

# SCIENTIUM

**Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah untuk Pengembangan  
IPTEK, Kemanusiaan dan Kebudayaan Universal**

**Pemberitaan Kampanye Surat Kabar Lokal  
Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2017**

**Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada  
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Di Kawasan Taman  
Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten**

**Pengembangan Modul Koloid Berorientasi Potensi Lokal Kabupaten  
Pandeglang**

**Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pada Website Badan Pusat  
Statistik Provinsi Banten**

**Potensi Dampak Sosial Ekonomi Kedatangan Tenaga Kerja Asing di  
Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang**



Penerbit:  
DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROVINSI BANTEN

Riset Pengembangan IPTEK, Kemanusiaan, dan Kebudayaan Universal	Volume: 7	Nomor:1	Terbit Juni 2018
---	--------------	---------	------------------

---

# Scientium

## Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah untuk Pengembangan IPTEK, Kemanusiaan dan Kebudayaan Universal

---

Scientium adalah jurnal dalam bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, sosial, dan humaniora yang memuat hasil penelitian dan telaahan tentang Banten dan atau dilakukan di wilayah Provinsi Banten. Dalam setiap penerbitan Scientium memprioritaskan naskah hasil penelitian, sebanyak minimal 60% dari jumlah keseluruhan artikel yang dimuat. Scientium bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian tentang Banten yang dilakukan oleh para peneliti dan akademisi di Provinsi Banten.

### Dewan Editor (Editorial Board)

Penanggungjawab	: Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten MA Tihami
Ketua Editor (Editor in Chief)	: Abdul Hamid
Editor Pelaksana (Managing Editor)	: Ahmad Supena
Sekretaris Redaksi (Secretary)	: M Turizal Husein
Editor Ahli/Advisory Board	: MA Tihami Dodi Nandika Firman Hadiansyah M. Masduki Egi Djainuswati

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Kantor Dewan Riset Daerah Provinsi Banten

Gedung Bappeda Provinsi Banten Lt.2 Kawasan KP3B Serang-Banten,

E Mail: [drdbanten2016@gmail.com](mailto:drdbanten2016@gmail.com).

Website: <http://www.drdbanten.org/jurnal/index.php/jurnal>

---

Scientium menerima naskah hasil penelitian dan naskah hasil penelaahan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, sosial, dan humaniora. Hasil penelitian dan penelaahan dimaksud diutamakan yang dilakukan di wilayah Provinsi Banten. Artikel yang diterima akan ditelaah oleh reviewer untuk dinilai kelayakannya. Panduan penulisan (gaya selingkung) dapat dibaca di akhir setiap edisi.

---

---

**Scientium**  
**Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah untuk Pengembangan**  
**IPTEK, Kemanusiaan dan Kebudayaan Universal**

---

**DAFTAR ISI**

**Pemberitaan Kampanye Surat Kabar Lokal  
Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2017**  
Darwis Sagita, Faisal Tomi Saputra (Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).....1

**Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar  
Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau  
Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten**  
Andri Ginson (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat).....13

**Pengembangan Modul Koloid Berorientasi Potensi Lokal Kabupaten Pandeglang**  
Asih Kurniasih, Burhanudin Milama, Nanda Saridewi  
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).....29

**Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pada Website Badan Pusat Statistik  
Provinsi Banten**  
Anang Zakaria, Dirlanudin, Yearry Panji Setianto (Program Magister Administrasi Publik  
Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).....38

**Potensi Dampak Sosial Ekonomi Kedatangan Tenaga Kerja Asing di Kecamatan Pulo  
Ampel Kabupaten Serang**  
Shanty Kartika Dewi, Anis Fuad  
(Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).....64

---

**PEMBERITAAN KAMPANYE SURAT KABAR LOKAL  
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN 2017**

**Darwis Sagita, Faisal Tomi Saputra**

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTIRTA

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang – Banten 42118

Email : [darwis.sagita@fisip-untirta.ac.id](mailto:darwis.sagita@fisip-untirta.ac.id)

***Abstract***

*Newspaper as one of the media conventional, enough affecting the public opinion. Political content on their notification many people were interested in, especially during the development of the before the general elections or an election the head of the region. On election of heads of regional Banten, candidate couple number 1 was nominated for the governor Wahidin Halim and Andika Hazrumy. While couples the number 2 is the governor candidate Rano Karno with vice governor candidate for H. Embay Mulya Syarif. This research focus on campaign by both candidate couple. This can be done by means of observing campaign theme through the local media reported, In this matter is Radar Banten and Kabar Banten. And the approach used quantitative research. How counting frequency of occurrence campaign theme, and tone news each candidate couple. The result of this research is a tone news on a newspaper Kabar Banten and Radar Banten both candidate couple, equally dominated by the majority tone neutral and positive news. Other conclusions are the campaign raised in the Kabar Banten, the candidate couple number 1 is dominated by the theme of development and education, while candidate couple number 2 is dominated by the theme of development and corruption. Then to newspaper Radar Banten, the couple number 1 is dominated by the theme of development and economic, while candidate couple number 2 dominated by corruption and economic themes.*

*Keywords: campaign, local head election, local newspaper*

**1. PENDAHULUAN**

Masyarakat hari ini sangat berinteraksi dengan media massa. Bagaimana kehidupan bermedia masuk ke dalam aktivitas masyarakat tanpa dapat dibendung, sehingga seakan-akan hampir setiap orang tidak bisa melewati hari tanpa media. Apalagi dengan melihat jumlah media yang beredar di Indonesia saat ini sangatlah banyak. Media tradisional seperti koran, majalah, radio, dan televisi mungkin masih merupakan media yang paling banyak, serta paling mudah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Bila dulu hanya kaum terpelajar serta orang kantoran yang membaca

koran serta melihat berita di televisi, maka saat ini kita bisa dengan mudah menemukan tukang ojek yang asyik membaca koran sambil menunggu penumpang.

Media tradisional dapat dikatakan sudah begitu luar biasa memberikan pengaruhnya pada aktivitas keseharian masyarakat, kemudian ditambah lagi dengan munculnya salah satu hasil pengembangan teknologi yaitu internet. Internet sendiri kemudian menjelma menjadi media yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi. Jika kita melihat pada era sebelumnya di mana seseorang berkomunikasi dalam skala besar hanya untuk memperoleh informasi dan

berperan sebagai komunikator melalui media tradisional seperti surat kabar, saat ini masyarakat menggunakan fasilitas internet dan media sosial untuk memperoleh informasi dan bahkan menjadi komunikator secara bebas. Melalui media sosial, seseorang dapat berbagi apa saja yang ingin ia bagikan pada sesama pengguna media sosial tersebut yang telah terhubung dengan akun yang dimiliki.

Sejalan dengan semakin masivnya penggunaan internet untuk mengkonsumsi informasi, tidak pula menutup media konvensional yang sudah lebih dahulu ada. Terkait dengan bagaimana suatu informasi terdokumentasikan dengan baik dan kedalaman informasi didapatkan, masyarakat pun tetap punya pilihan seperti ini dalam media massa konvensional.

Salah satu media yang cukup berpengaruh pada masyarakat adalah surat kabar. Media cetak surat kabar sendiri mempunyai kelebihan dalam penyampaian informasinya kepada masyarakat, yakni harganya yang relatif murah, beritanya menyeluruh, jangkauannya luas mencakup masyarakat di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan (Ruslan, 2005, p.188-189 dalam Elton, 2007).

Surat kabar sebagai salah satu media konvensional pada pembentukan opini masyarakat terbilang signifikan. Jumlah media yang beredar di Indonesia saat ini sangatlah banyak. Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan media yang paling banyak dan paling mudah untuk menyampaikan pesan kepada

masyarakat. Bila dahulu hanya kaum terpelajar serta orang kantoran yang membaca koran serta melihat berita di televisi, maka saat ini kita bisa dengan mudah menemukan tukang becak yang asyik membaca koran sambil menunggu penumpang. Jadi tidak heran bila pengaruh media pada aktivitas masyarakat cukup signifikan.

Salah satu konten yang dikutip pada data di atas adalah politik. Konten politik semakin banyak diminati terutama pada masa menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Namun terlepas dari momen pemilihan umum atau kepala daerah, masalah politik juga mendapat porsi perhatian, seperti pada masalah konflik yang bersinggungan di antara pejabat. Mengikuti adagium *bad news is good news*, berita konflik selalu menjadi bahan berita yang dicari oleh awak media. Hal ini sejalan dengan peran media di masyarakat yang menganut sistem politik demokrasi (McQuail, 1994), karena itulah korupsi layak diberitakan, bukan hanya karena memiliki nilai jual sebagai *bad news* tapi juga sudah merupakan tugas media sebagai penjaga terhadap segala bentuk kemungkinan penyimpangan kekuasaan.

Kondisi ini cukup dirasakan oleh masyarakat Banten yang pada tahun ini mengikuti pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2017, Banten salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak yang sudah dimulai pada tahun 2015. Pada pemilihan Kepala Daerah Banten 2017 dua pasangan calon bertarung secara bipolar (dua kutub). Hal ini menjadikan pemberitaan menarik,

ketika hanya terdapat dua pasangan calon kemungkinan aksi saling serang terbuka luas. Bagaimana masing-masing pasangan calon akan memutar otak demi mencari strategi terbaik dalam menarik simpati masyarakat, dan sangat berpeluang menjatuhkan atau menyerang pihak lawan.

Seperti diketahui bersama bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah Calon Gubernur Wahidin Halim yang akrab disapa WH dengan Andika Hazrumy. Sedangkan calon pasangan nomor urut 2 adalah Calon Gubernur Rano Karno dengan Calon Wakil Gubernur H. Embay Mulia Syarif. Melihat latar belakang kedua pasangan calon, menjadi menarik untuk dicermati. Pasangan calon nomor 1 dengan calon Gubernur Wahidin Halim dikenal sebagai tokoh yang sudah pernah menjadi Walikota Tangerang selama dua periode. Sebagaimana diketahui bahwa pada era kepemimpinannya, Wahidin Halim selalu mendapat predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini terbilang positif dalam citra akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun disisi lain, calon Wakil Gubernur pada pasangan calon nomor 1 ini, yaitu Andika Hazrumy dikenal sebagai putra mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (Akrab dipanggil Atut). Di mana Atut telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi pada era kepemimpinannya.

Pada pasangan calon lain, yaitu pasangan calon nomor 2 (Rano Karno dan H. Embay Mulia Syarif) adalah petahana. Di mana Rano Karno diangkat menjadi Gubernur menggantikan Atut

setelah terbukti bersalah pada kasus korupsi di pengadilan. Selain itu, pasangan calon ini juga diusung oleh partai pemenang pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan dukungan koalisinya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (Nsdem).

Dengan mengamati latar belakang singkat diatas menarik bagi peneliti untuk berfokus kepada strategi kampanye yang dimainkan oleh kedua pasangan calon. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengamati tema-tema kampanye yang disampaikan. Dan sebagai pendekatan untuk melihatnya adalah pendekatan sudut pandang media, yaitu dengan melihat pemberitaannya. Selain dengan mengamati tema kampanye, peneliti juga mencermati bagaimana nada berita kampanye masing-masing pasangan calon. Dengan melihat kemungkinan memberikan nada berita positif, negatif atau netral.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Surat Kabar**

Menurut Onong Uchjana Effendy, "Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca" (Effendy, 1993, p.241). Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti

sekarang ini. Selain itu surat kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai beberapa hal, sehingga hampir sebagian besar dari masyarakat menggantungkannya kepada pers untuk memperoleh informasi.

Pada umumnya kalau kita berbicara mengenai pers sebagai media massa tercetak ialah dalam pengertian sempit, yakni surat kabar. Menurut Onong Uchjana Effendy ada empat ciri yang dapat dikatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh surat kabar, antara lain :

1. *Publisitas (Publicity)*

Yang mengandung arti penyebaran kepada khalayak atau kepada publik. Karena diperuntukkan untuk khalayak umum, isi atau informasi dalam surat kabar ini terdiri dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan umum. Untuk itu, penerbitan yang meskipun sama dengan surat kabar tidak bisa disebut sebagai surat kabar jika hanya ditujukan kepada sekelompok orang atau golongan.

2. *Periodesitas (Periodicity)*

Yang berarti keteraturan dalam penerbitannya. Keteraturan ini bisa satu kali sehari bisa juga satu atau dua kali terbit dalam seminggu. Karena mempunyai keteraturan dalam penerbitannya, maka penerbit buku tidak dapat dikategorikan sebagai surat kabar meskipun isinya menyangkut kepentingan umum karena tidak disebarkan secara periodik dan berkala.

3. *Universalitas (universality)*

Yang berarti kemestaan dan keragaman. Isinya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Untuk itu jika sebuah penerbitan berkala isinya hanya mengkhususkan diri pada suatu profesi atau aspek kehidupan, seperti majalah kedokteran, arsitektur, koperasi atau pertanian, tidak termasuk surat kabar. Memang benar bahwa berkala itu ditujukan kepada khalayak umum dan diterbitkan secara berkala, namun bila isinya hanya mengenai salah satu aspek kehidupan saja maka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori surat kabar.

4. *Aktualitas (Actuality)*

Menurut kata asalnya aktualitas, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”. Kedua-duanya erat sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan surat kabar. Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini, dengan perkataan lain laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang dilaporkan itu harus benar. Tetapi yang dimaksudkan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yaitu kecepatan laporan, tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran berita (Effendy, 1993, p.119-121).

Adapun Surat kabar yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah surat kabar lokal Radar Banten dan Kabar Banten. Mengingat keduanya termasuk ke dalam surat kabar yang sudah cukup banyak memiliki pelanggan atau khalayak di Provinsi Banten.

**Kampanye**

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai

dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*.

Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (Cangara, 2011, p.223). Sedangkan menurut Imawan (dalam Cangara, 2011, p.223) mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka berseia bergabung dan mendukungnya. Sementara pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto (dalam Cangara, 201, p.229) adalah sebagai berikut: "*campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or*

*abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior.*" (kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menrima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu)".

Merujuk pada definisi-definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni: a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, b. Jumlah khalayak sasaran yang besar, c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

### **Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten**

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan



fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Seperti diketahui bersama pada pemilihan kepala daerah Banten diikuti oleh pasangan calon nomor 1 adalah Calon Gubernur Wahidin Halim yang akrab disapa WH dengan Andika Hazrumy. Sedangkan calon pasangan nomor 2 adalah Calon Gubernur Rano Karno dengan Calon wakil gubernur H. Embay Mulia Syarif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan teknik analisis isi. Metode Deskriptif ialah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Whitney mendefinisikan metode deskriptif sebagai pencarian fakta dengan interpretasi yang

tepat (Nazir, 1988, p.62). Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988, p.63). Penelitian deskriptif seringkali terjadi karena suatu peristiwa yang menarik perhatian penelitian yang bertindak sebagai pengamat dengan cara membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasinya.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik penelitian analisis isi. Teknik analisis isi merupakan teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang nyata secara deskriptif, sistematis dan kuantitatif. Menurut Krippendorff analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteks.

Berelson menggambarkan Analisis Isi sebagai teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi nyata secara objektif, sistematis dan kuantitatif (Berelson, 1983, p.8). Menurut Stempel ada empat tahapan yang dilakukan dalam penelitian Analisis Isi yaitu: pemilihan satuan analisis, konstruksi kategori, penarikan sampel isi dan reliabilitas koding.

Satuan analisis adalah unsur dari isi pesan yang hendak diteliti. Stempel mengatakan isi komunikasi yang nyata berarti isi yang tersurat. Ada beberapa cara untuk mengukur isi surat kabar. Berelson menyarankan lima metode yaitu : Kata-kata, tema-tema, sifat-sifat, hal-ihwal atau satuan ruang. Menurut pendapat penulis hal-ihwal atau satuan ruang cocok untuk keperluan studi ini. Isi tersurat dari setiap rubrik surat pembaca dihitung menurut frekuensi penampilannya dalam batas-batas penggolongan dan kategori yang lebih dulu ditetapkan. Metode pengukuran sifat-sifat isi yang paling banyak dipakai adalah frekuensi yang mencatat setiap kejadian dari sifat tertentu (Holsti, 1969, p.122 )

### **Konstruksi Kategori**

Konstruksi kategori merupakan semacam alat yang digunakan untuk mengupas permasalahan dalam penelitian. Kategori yang dibuat berfungsi memilah isi pesan yang tersurat menjadi gambaran (berupa data) yang dapat dianalisa untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Kategorisasi merupakan langkah yang penting sekali dan harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Untuk menciptakan seperangkat kategori-kategori, menurut Stempel ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan :

- (1) Kategori-kategorinya harus relevan dengan tujuan-tujuan studi,
- (2) kategori-kategorinya hendaklah fungsional, dan
- (3) sistem kategori-kategorinya harus dapat dipakai.

Konstruksi Kategori pada penelitian ini adalah perihal Perspektif Pemberitaan (Suroso, 2002, p.29) mengatakan bahwa perspektif pemberitaan dalam surat kabar antara lain adalah perspektif pro masyarakat, perspektif netral, dan perspektif pro yang lain.

1. Perspektif pro masyarakat adalah sudut pandangan dalam melihat dan melaporkan suatu peristiwa didasari oleh nilai keyakinan, ide dan pandangan dari masyarakat.
2. Perspektif netral adalah sudut pandang dalam melihat dan melaporkan suatu peristiwa yang didasari oleh sikap wartawan yang akomodatif dan netral terhadap semua pihak yang terlibat dalam wacana berita, yakni masyarakat di satu sisi dan masyarakat di pihak lain.
3. Perspektif pro yang lain adalah sudut pandang dalam melihat dan melaporkan suatu peristiwa yang didasari sikap wartawan yang pro dengan golongan, institusi atau pihak tertentu.

Dalam penelitian analisis isi pemberitaan kampanye surat kabar lokal pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2017 ini diinterpretasikan menggunakan dua indikator yang ada yaitu tema kampanye dan nada pemberitaan. Tema kampanye merupakan langkah awal untuk menuju pada kampanye dalam pemberitaan keseluruhan. Indikator kedua yaitu nada pemberitaan. Dalam melaporkan suatu peristiwa, wartawan secara sadar maupun tidak sadar memberikan penilaian sebagai ekspresi dari apa yang diyakininya. Penilaian dalam surat

kar dapat berupa mendukung atau memihak (seperti pujian, simpati, suka, setuju, menerima), sikap tidak mendukung atau tidak memihak (seperti sinis, antipati, tidak suka, tidak setuju, menolak), dan sikap netral yang tidak memihak atau mendukung. Nada pemberitaan merupakan representasi wartawan yang didasari ideologi, pengetahuan, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki pribadi wartawan maupun intuisinya (Suroso, 2002, p.29). Nada pemberitaan pada penelitian ini merujuk pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang kampanyenya diberitakan pada media lokal.

#### **Populasi dan Sampel**

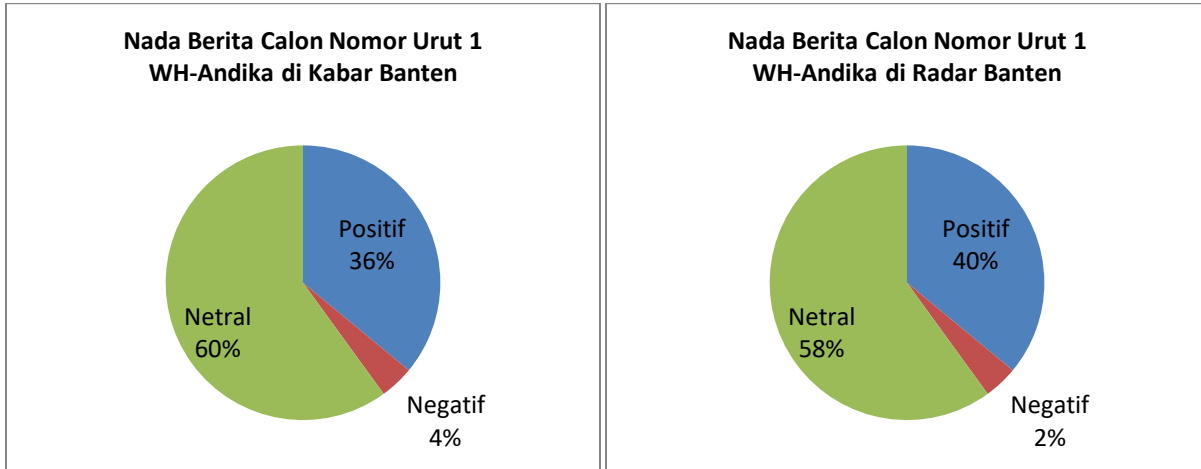
Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 1988, p.325). Populasi merupakan kumpulan objek penelitian (Rakhmat, 1995, p.106). Populasi merupakan sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1982, p.5). Populasi atau objek dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai kampanye pemilihan kepala daerah Provinsi Banten 2017 pada surat kabar lokal. Adapun surat kabar lokal yang dipilih adalah Kabar Banten dan Radar Banten, dengan periode terbit yang dibatasi pada tanggal 1-30 November 2016. Dengan jumlah berita di surat Kabar Banten sebanyak 107, dan Radar Banten sejumlah 60 berita. Sehingga populasi keseluruhan adalah 167 berita.

Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang ada untuk dapat mewakili populasi (Nursalam, 2008). Sampel dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis total sampling yaitu seluruh populasi diambil untuk dijadikan sebagai sampel.

#### **4. PEMBAHASAN**

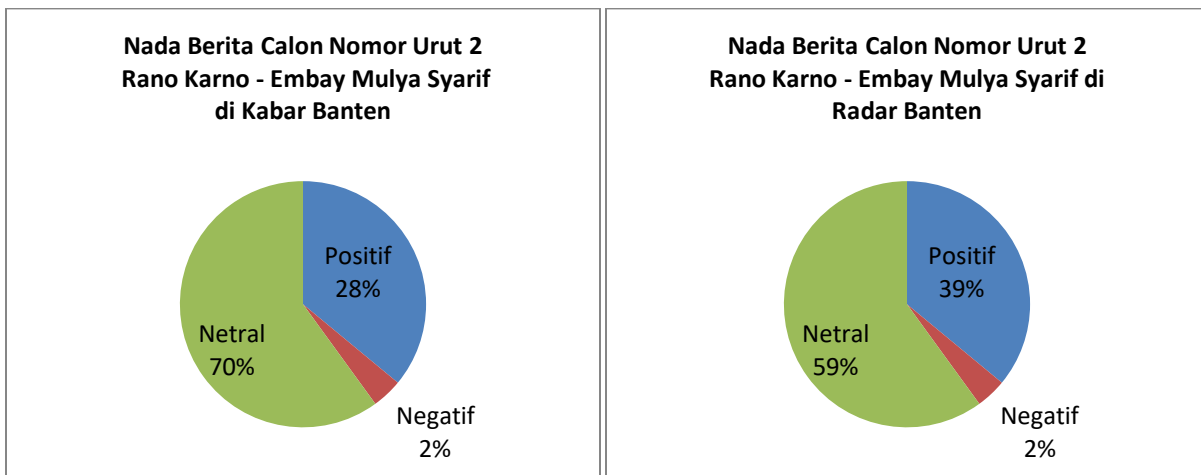
Dalam penelitian ini ditentukan dua kategori dalam analisis isi berita untuk menggambarkan bagaimana pemberitaan politik yang dilakukan surat kabar dalam konteks nada berita yang terbagi atas positif, negatif dan netral. Kemudian kategori tema berita yang difokuskan pada tema kampanye untuk melihat lebih jauh bagaimana tema-tema tertentu dipilih oleh para calon untuk mendapat perhatian publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 75 berita yang menampilkan pemberitaan kampanye pada calon nomor urut 1 yakni Wahidin Halim dan Andika Hazrumy nada berita yang digambarkan surat kabar "Kabar Banten" cenderung positif sebesar 36 % (27 berita), negatif sebesar 4 % (3 berita) dan netral 60% (45 berita). Begitupun surat kabar Radar Banten dari 40 berita kampanye yang ditampilkan dengan persentase 40% (16 berita) di nada pemberitaan positif, 2 % (1 berita) negatif dan 58% (23 berita) cenderung netral dari nada pemberitaan.



Sementara pasangan calon nomor urut 2 yakni Rano Karno dan Embay Mulya Syarif nada berita yang digambarkan surat kabar Kabar Banten cenderung positif sebesar 28 % (21 berita), negatif sebesar 2 % (1 berita) dan netral 70% (52 berita). Begitupula di surat kabar Radar Banten

dari 40 berita kampanye yang ditampilkan dengan angka 39% (17 berita) di nada pemberitaan positif, 2 % (1 berita) negatif dan 59% (26 berita) cenderung netral dari nada pemberitaan.



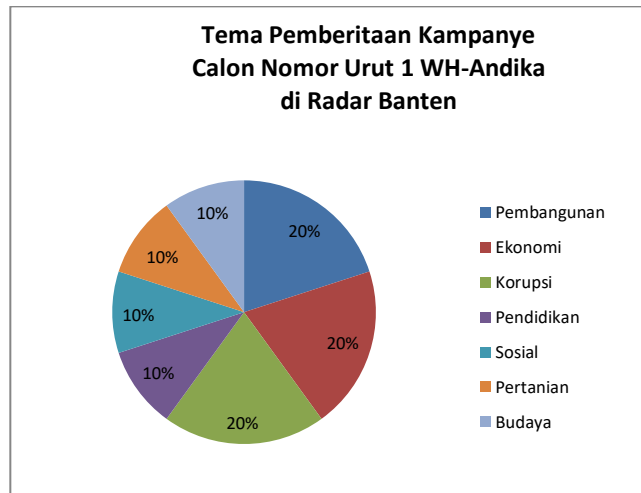
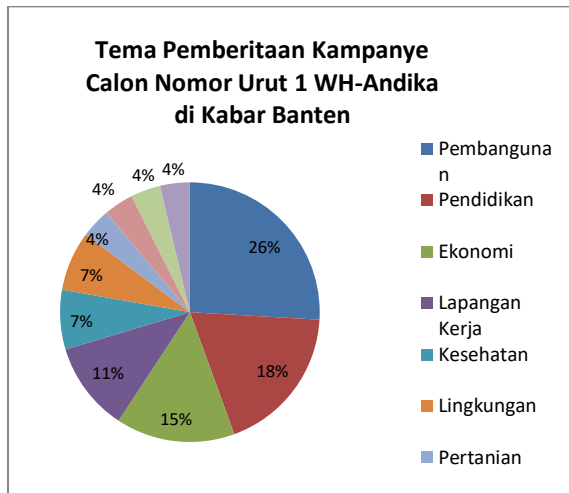
Tema berita yang ditampilkan surat kabar di Banten pada pemberitaan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2017, yang diikuti oleh pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy

dan Rano Karno-Embay Mulya Syarif mengangkat tema-tema yang umumnya menjadi program-program unggulan kedua calon tersebut

seperti tema pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

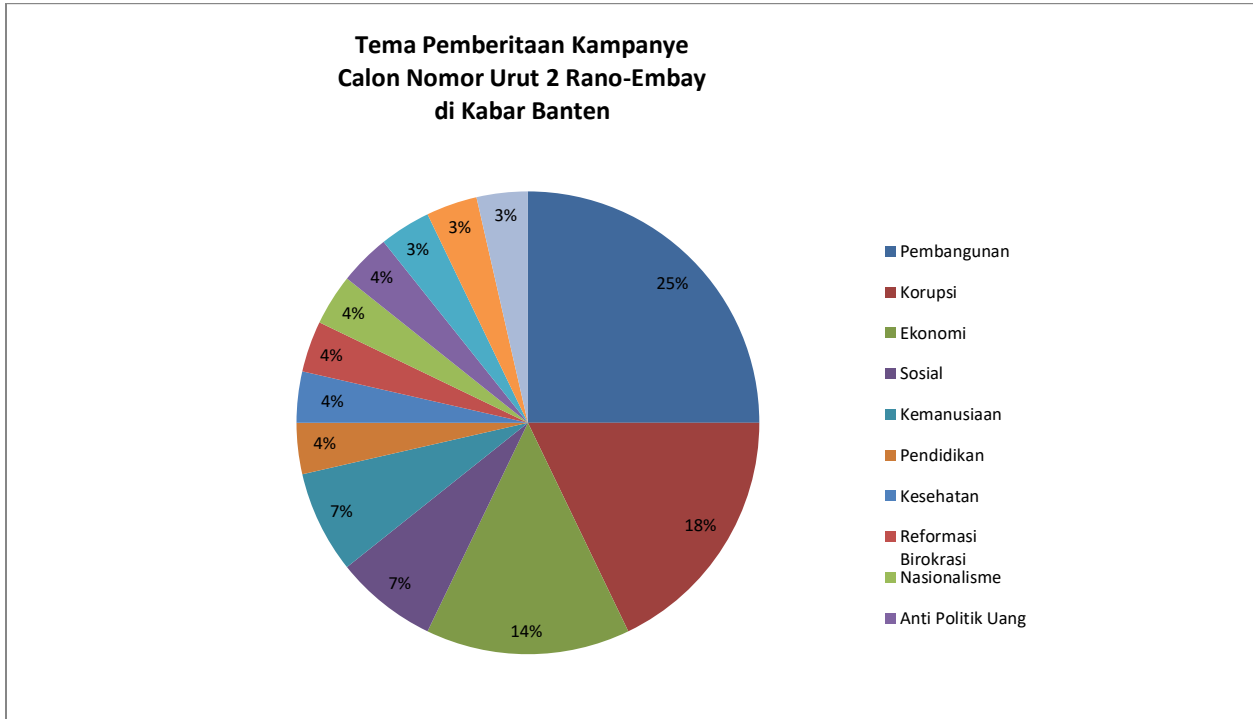
Kabar Banten banyak mengangkat tema-tema isu pembangunan yang menjadi program unggulan calon nomor urut 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebesar 26%, tema tentang pendidikan sebesar 18%, ekonomi 15%, lapangan kerja 11%, kesehatan 7% dan isu-isu yang

lainnya masing-masing 4%. Sementara di Radar Banten, tema pemberitaan yang diangkat dalam pemberitaan kampanye nomor urut 1 didominasi tentang tema pembangunan, ekonomi, dan korupsi masing-masing dengan presentase 20%, disamping tema-tema lain seperti pendidikan, pertanian, olahraga dan agama masing-masing sebesar 10%.



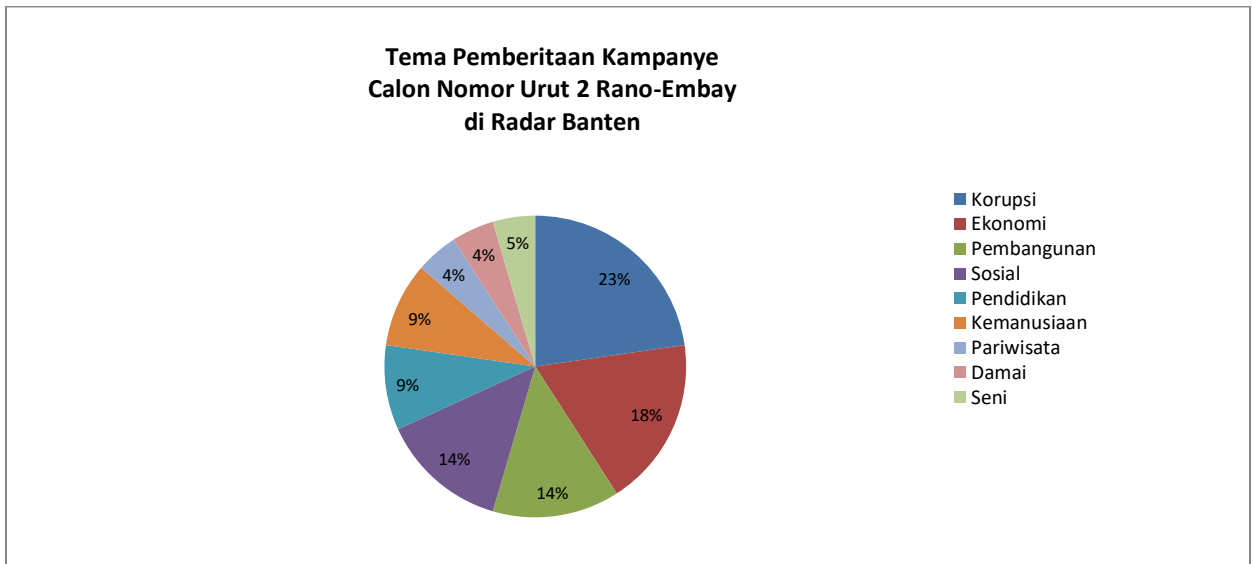
Tema berita dalam kampanye pasangan nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarif pada pemilihan kepala daerah Provinsi Banten tahun 2017 digambarkan surat kabar “Kabar Banten” dengan tema Pembangunan sebesar

25%, korupsi sebesar 18%, ekonomi 14%, sosial dan kemanusiaan masing-masing 7%. Disamping tema-tema lain seperti pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi dan nasionalisme dan anti politik uang.



Sedangkan di surat Kabar Radar Banten pasangan nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarif pada pemilihan kepala daerah Provinsi Banten tahun 2017 digambarkan dengan tema pemberitaan tentang korupsi sebesar 23%,

ekonomi 18%, sosial dan pembangunan masing-masing sebesar 14%, pendidikan dan kemanusiaan sebesar 9%, dan tema lain seperti pariwisata, seni dan kampanye damai.



## 5. KESIMPULAN

1. Nada berita pada surat kabar Kabar Banten dan Radar Banten terkait kedua pasangan calon relatif sama, yaitu sama-sama didominasi oleh mayoritas nada berita netral dan positif. Sedangkan nada berita negatif sama-sama hanya memuat 2% berita.
2. Kesimpulan lain pada penelitian ini adalah tema kampanye yang dimunculkan pada surat kabar Kabar

Banten terkait pasangan calon nomor 1 didominasi oleh tema Pembangunan dan Pendidikan, sedangkan pasangan calon nomor 2 didominasi oleh tema Pembangunan dan Korupsi. Sementara itu, pada surat kabar Radar Banten terkait pasangan calon nomor 1 didominasi oleh tema Pembangunan dan Ekonomi, sedangkan pasangan calon nomor 2 didominasi oleh tema Korupsi dan Ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Ancok, D dan Suroso, N F. 2008. Psikologi Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Berelson, Bernard. 1983. Analysis Research. New York: Hafner Press.

Cangara, Hafied. 2011. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Davis, Keith dan John W., Newstorm.1994 Perilaku Dalam Organisasi, Alih Bahasa Agus Dharma, Erlangga, Jakarta.

Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Bandung, Rosdakarya.

Holsti, Ole R. 1969. Content Analysis for the Social Science and Humanities. Reading, Massachusetts : Addison – Westley Publishing.

McQuail, Dennis. 1994. Mass Communication Theory : An Introduction. London. Sage Publications.

Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Rakhmat, Jalaludin. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Rosda Karya.

Rakh Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. (2001). Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru.mat,

Sudjana. 1982. Metode Statistika. Edisi kelima. Bandung : Tarsito.

### Sumber Lain:

<http://e-journal.uajy.ac.id/>

Kabar Banten, 1-30 November 2016

Radar Banten, 1-30 November 2016

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

Undang- Undang Pasal 1 Undang- Undang

Nomor 1 PNPS/1965

[www.ida.or.id](http://www.ida.or.id)

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT DI KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PULAU SANGIANG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN**

**Andri Ginson**

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat  
Jl. Gede Bage Selatan No.117, Rancabolang, Gedebage,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40295  
Email: skw1\_serang@yahoo.com

***Abstract***

*This study aims to determine the effectiveness of the implementation of non-tax revenue collection on the Central Conservation of Natural Resources of West Java in the Area Nature Park Sangiang Island Serang regency of Banten Province. The formulation of the problem is how the effectiveness of the implementation of non-tax revenues levies at the Central Conservation of Natural Resources of West Java in the Area of Nature Park Sangiang Island Serang regency of Banten Province. This research use mix method: sequential explanatory model. Respondents of this research are visitors of Nature Park Area Sangiang Island Serang Regency of Banten Province, while the informant of this research is Head of West Java Natural Resources Conservation Center, PNBP collecting officer, visitors, surrounding community, and PKP Company. The survey results show that the implementation of non-tax revenue levies at West Java Natural Resource Conservation Center in Nature Park Region Sangiang Island Serang regency of Banten Province is not effective at the significance level  $\alpha = 0.05$  (5%). The results of the interviews found that the time targets for the effectiveness of PNBP levies have not been fully implemented by officers and the non-tax revenue of the past 2 years has not met the set targets. Central Conservation of Natural Resources of West Java in the Area of Nature Park Sangiang Island Serang regency of Banten province must make a rational PNBP revenue planning in accordance with the conditions in the field and the planning should be communicated with the relevant parties, especially the partners managers of tourism objects in the Park Area Sangiang Island Nature Tourism so that each party knows the steps that need to be done to achieve the target together.*

*Keywords: communication, non-tax revenue levies, Natural Resources Conservation Center*

**1. PENDAHULUAN**

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah membangun masyarakat yang sejahtera sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah melaksanakan berbagai program pembangunan. Dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan tersebut,

diperlukan modal untuk mendanai atau mendukung keberhasilan program tersebut. Untuk itu perlu adanya penggalan sumber-sumber dana, diantaranya berasal dari pajak dan bukan pajak.

Salah satu sumber dana yang perlu dioptimalkan dalam penggaliannya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan



salah satu sumber penerimaan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari tahun ketahun semakin meningkat. Meningkatnya peranan ini bukan hanya dari data penerimaan saja tetapi diharapkan juga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa produk peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam pelaksanaannya, khususnya pada Kementerian Kehutanan, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 656/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK.06/2001 di atas.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumberdaya

Alam dan Ekosistem mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Pengelolaan kawasan cagar alam, taman wisata alam, taman wisata laut, taman buru dan suaka margasatwa;
- 3) Penyidikan, perlindungan dan pengamanan kawasan;
- 4) Pengendalian kebakaran hutan;
- 5) Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 6) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 7) Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- 8) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan cagar alam;
- 9) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- 11) Pengawasan tumbuhan dan satwa liar.

Dalam pelaksanaan tugasnya yaitu mengembangkan dan memanfaatkan jasa lingkungan dan pariwisata alam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat melaksanakan pengelolaan obyek wisata alam selain yang ada di Provinsi Jawa Barat juga mengelola wisata alam yang berada di Provinsi Banten yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Sangiang. Terkait dengan kegiatan pengelolaan wisata alam ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat diamanatkan untuk melaksanakan pungenan

PNBP untuk kegiatan wisata alam di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang tersebut.

Taman Wisata Alam Pulau Sangiang dengan luas 1.248,15 Ha terdiri dari luas TWA daratan Pulau 528,15 Ha ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 55/KPTS-II/1993 tanggal 8 Februari 1993 dan Penunjukan Perairan TWA Pulau Sangiang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 698/KPTS-II/1991 tanggal 12 Oktober 1991 seluas 720 Ha, Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Taman Wisata Alam Pulau Sangiang merupakan kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Satwa dan tumbuhan serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan TWA Pulau Sangiang kaya akan potensi baik Flora, Fauna maupun Fenomena Alam terdapat di Darat ataupun di perairan.

Karena potensinya tersebut Taman Wisata Alam Pulau Sangiang mempunyai peranan yang strategis bagi pembangunan di sekitarnya, sehingga perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kepentingan pengelola khususnya dan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Pulau Sangiang. Saat ini pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau

Sangiang bekerjasama dengan mitra wisata yaitu PT. Pondok Kalimaya Putih. Pemahaman mitra wisata mengenai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak masih sangat terbatas, hal ini mengakibatkan belum optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan belum efektifnya pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat yaitu di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang adalah:

- 1) Belum semua obyek wisata alam yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dapat dilaksanakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara optimal, diantaranya kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang yang belum dikelola dengan baik dan belum mengikuti mekanisme pungutan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Belum semua jenis pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diterapkan di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang. Hal tersebut terkait dengan belum profesionalnya pengelolaan obyek wisata yang ada, sehingga pengurus serta pengelolaannya belum terstruktur dengan baik, karena kurangnya pembinaan dari pihak terkait. Gejala-gejala tersebut timbul akibat dari hal-hal sebagai berikut :
  - a) Kurangnya koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dengan pihak terkait dalam

pengelolaan obyek wisata alam Pulau Sangiang;

- b) Belum berjalannya mekanisme monitoring/pemantauan pelaksanaan pungutan PNBPN pada obyek wisata alam Pulau Sangiang.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukan pajak pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten?

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Efektivitas**

Mempelajari pengertian efektivitas kerja, terlebih dahulu dapat penulis uraikan tentang pengertian efektivitas kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Emerson dalam Handyaningrat (2000: 16) menjelaskan efektif adalah bila suatu sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

Selanjutnya The Liang Gie (2000: 37) mengemukakan pengertian efektivitas kerja yaitu mengandung arti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jadi perbuatan seseorang yang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang lain.

Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut di atas disimpulkan bahwa efektivitas

merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berhasil dengan tepat sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan.

Apabila pengertian efektivitas disatukan dengan pengertian kerja maka, efektivitas kerja adalah usaha bekerja yang berhasil sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian efektivitas kerja menurut Siagian (2000: 151) menyatakan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkannya untuk itu.

Dari definisi di atas dapatlah kiranya diinterpretasi bahwa efektivitas kerja mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik pula efektivitas kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin lamanya pekerjaan tersebut terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan tersebut dari keefektifannya.

Selanjutnya Yakub (2000: 39) mengemukakan pengertian efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dulu. Tujuan manajemen dapat tercapai (artinya

manajemen yang efektif), tidak selamanya disertai efisiensi yang maksimum dengan perkataan lain manajemen yang efektif tidak selalu disertai manajemen yang efisien.

Sedangkan menurut Robbins (2000: 253) mengemukakan bahwa efektivitas adalah tingkat kemampuan organisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, oleh karena itu efektivitas dapat dinilai melalui ketepatan waktu dan penyelesaian pekerjaan serta kualitas hasil pekerjaan.

Sedangkan menurut Amsyah (2003:130) mengatakan bahwa efektivitas kegiatan mulai dengan adanya fakta kegiatan sehingga menjadi data, baik yang berasal dari hubungan dan transaksi internal dan eksternal maupun berasal dari hubungan antar unit dan didalam unit itu sendiri.

Selanjutnya menurut Susanto (2004:41) mengatakan bahwa efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Menurut Effendy (2006:16) mengatakan bahwa efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajemen yang efektif disertai dengan manajemen yang efisien.

Menurut pendapat Darsono dan Siswandoko (2011:77-78) yang mengemukakan bahwa efektivitas kinerja ialah "kemampuan

suatu organisasi mencapai tujuannya dalam kurun ruang dan waktu tertentu (jangka pendek atau jangka panjang) atau tingkat pencapaian tujuan atau seberapa cepat dan tepat tujuan yang dicapai."

Efektivitas apabila didasarkan pada hasil, maka pencapaian upaya manusia menuju hasil yang dimungkinkan dinyatakan dalam bentuk output atau kualitas. Dengan demikian, seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Ahli manajemen mengemukakan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar sedang efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Bagi seorang manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, serta memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan.

Menurut Darsono dan Siswandoko (2011:197) Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan adalah efektivitas kinerja adalah:

- 1) Tingkat pencapaian tujuan atau target pekerjaan maksimal.
- 2) Hasil mutu pekerjaan yang dihasilkan berkualitas.
- 3) Prestasi kerja dikelola secara lebih efektif sehingga waktu pekerjaan digunakan secara baik.
- 4) Jumlah pekerjaan lebih efisien.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas efektivitas kerja yaitu tercapainya tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya baik yang menyangkut

tingkat keberhasilan ditinjau dari target waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat keberhasilan ditinjau dari kualitas hasil pekerjaan maupun tingkat keberhasilan ditinjau dari kuantitas atau penyelesaian sejumlah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai sesuai dengan *job description*.

Selain itu menurut Abdurahman (2003:92) mengemukakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Menurut Ndraha (2005:163) mengemukakan efektivitas (*effectiveness*) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik *output? outcome? feedback?* Siapa yang mendefinisikannya pemerintah, yang-diperintah atau bersama-sama.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berhasil tepat pada

waktunya dengan jumlah kualitas dan kuantitas sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

### **Ukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978: 77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai

- upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
  - 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
  - 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
  - 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
  - 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya;
  - 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987: 55), yakni:

- 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi;
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005: 141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlaba
- 5) Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers (1985: 53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan  
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurum waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985;53), yaitu:

1) Pencapaian tujuan

2) Integrasi

3) Adaptasi

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan.

**Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, tujuan negara menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan tujuan negara memerlukan dana yang cukup besar, dan yang diutamakan sumber-sumber penerimaannya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan dalam negeri perlu secara terus menerus ditingkatkan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara.

Pada hakekatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulasi. Dengan fungsi budgetair dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan, karena itu diupayakan untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke dalam Rekening Kas Negara.

Dari aspek regulasi dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

1) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan

pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.

- 2) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 3) Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia.
- 4) Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara serta peningkatan pengawasan.

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak mencakup semua penerimaan dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diterima di dalam negeri, maupun luar negeri, diluar penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) serta penerimaan minyak dan gas bumi (migas).

Penerimaan ini dalam garis besarnya dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional. Penerimaan umum adalah yang secara umum terdapat pada setiap Departemen/Lembaga. Misalnya, sewa rumah dinas, hasil penjualan/lelang kendaraan dinas

dan penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasagiro) dan lain-lain. Sedangkan penerimaan fungsional adalah jenis-jenis penerimaan yang diperoleh sebagai hasil penjualan atau pemberian pelayanan yang diberikan oleh Departemen/Lembaga sesuai dengan fungsinya atau yang secara spesifik berada pada Departemen/Lembaga.

### **Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pada prinsipnya Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerimaan negara berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah penerimaan yang didapatkan dari sektor bukan pajak yang kemudian disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun fungsi dari PNBP itu sendiri adalah:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai sumber penerimaan  
Pada dasarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber Penerimaan Negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa atau penjualan barang milik negara oleh Departemen/Lembaga negara kepada masyarakat.
- 2) Pengaturan  
Selain berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PNBP dapat pula berfungsi sebagai alat pengaturan (regulasi) misalnya dalam kebijakan penentuan tarif dan penyesuaian-penyesuaian.

### **Sumber-Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak**



Saat ini PNBP dapat dikelompokkan menurut sifat pemungutannya dalam dua kelompok besar yaitu:

- 1) Penerimaan Umum yaitu PNBP yang secara umum terdapat pada setiap departemen/lembaga seperti:
  - a) Penerimaan penjualan seperti penjualan barang yang dihapuskan, penjualan kendaraan bermotor;
  - b) Penerimaan sewa seperti sewa rumah dinas, sewa gedung dan sewa barang milik negara lainnya;
  - c) Penerimaan jasa meliputi penerimaan jasa giro;
  - d) Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain, contohnya penerimaan kembali kelebihan pembayaran gaji/pensiun serta penerimaan denda.
- 2) Penerimaan fungsional yaitu PNBP yang bersumber dari hasil penyelenggaraan tugas/fungsi teknis suatu departemen/lembaga seperti:
  - a) Penerimaan rutin luar negeri seperti penerimaan visa/paspor, penerimaan pemeriksaan dan sebagainya;
  - b) Penerimaan khusus seperti pembagian laba BUMN, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan lain-lain Departemen Keuangan;
  - c) Penerimaan penjualan seperti penjualan hasil pertanian, hasil farmasi, hasil penerbitan dan sebagainya;
  - d) Penerimaan jasa seperti jasa rumah sakit, jasa kantor catatan sipil dan sebagainya;

- e) Penerimaan pendidikan seperti uang pendidikan, uang ujian masuk, uang ujian praktek dan sebagainya;
- f) Penerimaan kejaksaan dan pengadilan seperti legalisasi tanda tangan, denda tilang, ongkos perkara, uang leges dan sebagainya.

Struktur penerimaan APBN dalam garis besarnya terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri pada pokoknya terbagi menjadi:

- 1) Penerimaan perpajakan
- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  
Penerimaan PNBP mencakup
  - a) penerimaan Sumber Daya Alam,
  - b) bagian laba BUMN,
  - c) PNBP lainnya, dan pendapatan BLU.Penerimaan Sumber Daya Alam terdiri atas sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, sedangkan penerimaan non migas seperti pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi model *sequential explanatory*, dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap ke dua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.

Penelitian ini dimulai dengan kelompok variabel atau lebih yang berbeda kemudian menetapkan sebab-sebab dari perbedaan tersebut. Studi ini dimulai dengan melukiskan

keadaan terkini mengenai efektivitas Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan pelaksanaan pungutan penerimaan negara Taman Wisata Alam Pulau Sangiang bukan pajak pada Balai Besar Konservasi Kabupaten Serang Provinsi Banten.

**Operasionalisasi Penelitian**

Tabel 1 Operasionalisasi Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Item soal
Efektivitas Pungutan PNB	1. Pungutan sesuai waktu	▪ Pemungutan PNB pada hari libur	1,2
		▪ Pemungutan PNB pada hari kerja	3,4
		▪ PNB yang dibayar sesuai hari	5,6
Robbins (2000: 253)	2. Pungutan sesuai hasil	▪ Hasil yang diperoleh dari PNB	7,8
		▪ Target Pemungutan PNB	9,10,11
		▪ Capaian Pemungutan PNB	12,13,14
	3. Kualitas hasil kerja	▪ Tingkat kesalahan	15,16
		▪ Tingkat kerusakan	17,18
		▪ Tingkat kecermatan	19,20

**Teknik Sampling**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten

Serang Provinsi Banten yang berjumlah 4.182 orang. Dengan rumus *Isaac* dan *Michael* diperoleh sampel sebesar 94 orang, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *accidental*.

Tabel 2 Data Informan

No	Nama Informan	Jumlah	Lokasi Wawancara
1	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	1	Ruang Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
2	Petugas Pemungut PNB	3	Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten
3	Petugas Resort	3	
4	Pengunjung	3	
5	Masyarakat sekitar	2	
6	Perusahaan PKP	1	
Jumlah		13	

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan program SPSS version 24 untuk melakukan pengujian

sebagai berikut : 1) uji kualitas data, 2) teknik analisis data, 3) uji persyaratan analisis, 4) pengujian kriteria statistik, dan 5) uji hipotesis

serta menggunakan analisis data kualitatif 1) data collection, 2) data reduction, 3) data

display, dan conclusion: drawing/verifying

#### 4. Hasil Analisis Kuantitatif

**Tabel 3 One-Sample Test**

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,751	93	,630	55,29787	52,9982	57,5975

#### Hipotesis Statistik :

Selanjutnya hipotesis penelitian dijabarkan menjadi hipotesis uji berikut.

$H_0$  : Pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukan pajak pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten tidak efektif. ( $\beta_1 = 0$ )

$H_a$  : Pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukan pajak pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten sudah efektif. ( $\beta_1 \neq 0$ )

Statistik uji yang digunakan adalah uji-t.

Kriteria uji:

a) Terima  $H_0$  jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ .

b) Tolak  $H_0$  jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Dari tabel 3 *One-Sample Test* terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang bersesuaian dengan

pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukan pajak adalah 1,751. Karena nilai  $t_{hitung} = 1,751 < t_{tabel} = 2,000$  maka  $H_0$  diterima pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%). Ini berarti bahwa hipotesis penelitian, yaitu: pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukan pajak pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten tidak efektif diterima pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%).

#### 5. Hasil Analisis Kualitatif

##### a. Efektivitas pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilihat dari waktu

1) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan

Target waktu dalam rangka efektivitas pungutan PNPB belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Hal ini harus mendapat perhatian yang cukup serius dari pengelola kawasan agar pungutan PNBPN di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten mendapatkan hasil yang optimal.

- 2) Penyelesaian pekerjaan yang tersisa/tertunda

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten belum mencapai target waktu yang dipersyaratkan untuk mencapai efektivitas pungutan PNBPN di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Namun Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat telah menempuh langkah-langkah penyempurnaan guna mencapai efektivitas pungutan PNBPN.

#### **b. Efektivitas pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilihat dari Hasil**

- 1) Penyelesaian pekerjaan sesuai hasil dalam pengelolaan pungutan PNBPN, diakui target PNBPN di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten 2 tahun terakhir belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala teknis di lapangan.

- 2) Penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai hasil

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat belum efektif dalam melaksanakan pungutan PNBPN di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Untuk itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat harus membuat perencanaan penerimaan negara bukan pajak yang rasional sesuai dengan kondisi di lapangan dan perencanaan tersebut harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait khususnya para mitra pengelola obyek wisata di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten agar masing-masing pihak mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target bersama.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukan pajak pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten tidak efektif pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%). Selain itu hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa target waktu dalam rangka efektivitas pungutan PNBPN belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas, penyelesaian pekerjaan yang tersisa/tertunda belum mencapai waktu yang

dipersyaratkan untuk mencapai efektivitas pungutan PNBPN dan harus menempuh langkah-langkah penyempurnaan guna mencapai efektivitas PNBPN yang optimal, target PNBPN 2 tahun terakhir belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala teknis di lapangan. Serta perencanaan pekerjaan yang tidak sesuai hasil yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten harus membuat perencanaan penerimaan PNBPN yang rasional sesuai dengan kondisi di lapangan dan perencanaan tersebut harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait khususnya para mitra pengelola obyek wisata di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang agar masing-masing pihak mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target bersama.

#### **Saran**

Dari hasil analisa yang telah dilakukan pada penelitian ini ada beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukan pajak pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten *antara lain* :

- 1) Target waktu dalam rangka efektivitas pungutan PNBPN sepenuhnya dilaksanakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, agar mendapatkan hasil yang optimal
- 2) Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat agar menempuh

langkah-langkah penyempurnaan guna mencapai efektivitas pungutan PNBPN sesuai dengan target waktu yang dipersyaratkan

- 3) Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat agar dapat meminimalisir kendala-kendala teknis di lapangan agar target PNBPN di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten dapat memenuhi target.
- 4) Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat agar membuat perencanaan penerimaan negara bukan pajak yang rasional sesuai dengan kondisi di lapangan dan perencanaan tersebut harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait khususnya para mitra pengelola obyek wisata di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kabupaten Serang Provinsi Banten agar masing-masing pihak mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target bersama

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abdurahman, Maman, dkk. 2011. *Dasar-dasar Metode Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Astana, Satria. 2015. *Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Limbah Kayu Pemanenan di Hutan Alam Dan Hutan Tanaman (Potential Non-Tax State Revenue of Wood Waste from*

- Harvesting in Natural and Plantation Production Forests)* .....2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV. Alfabeta
- Darsono P dan Siswandoko, Tjatjuj. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Nusantara Consulting.
- Ernayani, Rihfenti, dkk. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang PNBP dan Cara Bayar PNBP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)*. Kalimantan Timur
- Gie, The Liang 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Modern
- Lubis S.M Hari dan Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta : Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial
- Muhidin, Sambas Ali & Abdurahman, Maman. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Mulyadi, Muhammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Publica Institute
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sarwani. 2013. *Analisis potensi dan efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat*. Kalimantan Barat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sondang P. Siagian. 1978. *Manajemen*. Yogyakarta : Liberty
- ..... 2000. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Slephen. P Robbins. 2000. *Perilaku organisasi*. Jakarta : Prenhallindo
- Steers, Richard M. Magdalena (Translator). 1985. *Motivation & Work*. Jakarta : PT. Erlangga
- Suwarno Handyaningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Syafi'i, Inu Kencana. 2013. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Peraturan Pemerintah :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada  
Kementrian Kehutanan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor  
656/KMK.06/2001 tentang Tatacara  
Penaan, Pemungutan, Penyetoran  
Pungutan dan iuran Bidang

Perlindungan Hutan dan Konservasi  
Alam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :  
P.02/Menhut-II/2006 tentang petunjuk  
Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan  
dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan  
dan Konservasi Alam

## PENGEMBANGAN MODUL KOLOID BERORIENTASI POTENSI LOKAL KABUPATEN PANDEGLANG

Asih Kurniasari, Burhanudin Milama, Nanda Saridewi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  
Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, 15412, Tangerang Selatan, Indonesia

E-mail: [asihkurniasari3@gmail.com](mailto:asihkurniasari3@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to develop and know the response of teachers and students to colloid-oriented learning module local potential Pandeglang District. This research is a development research with ADDIE development model (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Data obtained during the study were analyzed descriptively. The results of this study is a chemical learning module in which listed potential Pandeglang Regency associated with the colloidal system. The products are validated by experts and practitioners. In the final stages, the module is assessed by teachers and students of Senior High School in Pandeglang Regency based on the content and material feasibility aspects, linguistics, and presentation graphics. The result of the research shows the percentage of the teacher's evaluation of the module is 82.87%, and the percentage of students' evaluation on the module is 77.76%. The results indicate that the modules are well categorized. Based on the results of the research, the researcher suggests the need for further research to improve the product, therefore it is necessary to do similar research with different material and area. As well as to know the effectiveness of the modules developed, the research needs to be done up to a wide trial stage.*

**Keywords** : *colloid, module development, local potency*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang memiliki keragaman geografis, potensi sumber daya, kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah (Permendikbud Nomor 81A, 2013, hlm.4). Cara yang dapat ditempuh untuk melestarikan keragaman tersebut yaitu melalui pendidikan. Sarana yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui buku (Permendiknas Nomor 2, 2008, hlm.1). Buku adalah jenis bahan ajar cetak. Modul adalah salah satu jenis bahan

ajar cetak (Direktorat Pembinaan SMA, 2010, hlm.27).

Berdasarkan hasil wawancara tidak ada guru kimia di Kabupaten Pandeglang yang menggunakan bahan ajar berupa modul. Bahan ajar yang biasa digunakan adalah buku paket dan LKS yang sudah tersedia di pasar. Buku teks cenderung untuk keperluan umum, tidak terprogram, lebih menekankan sajian materi ajar, cenderung informatif, searah, cakupan materi lebih luas dan umum, serta pembaca cenderung pasif (Munadi, 2012, hlm.99), sementara modul merupakan bahan ajar yang dapat digunakan siswa secara mandiri



dengan seminimal mungkin bantuan dari orang lain, dibuat berdasarkan program pembelajaran yang utuh, cakupan bahasanya terfokus dan terukur (Munadi, 2012, hlm.99).

Penelitian Sumarti, Supartono, dan Diniy (2014, hlm.42) menunjukkan bahwa pembelajaran kimia menggunakan modul yang dikembangkan olehnya efektif diimplementasikan. Hasil wawancara dengan siswa di Kabupaten Pandeglang, menunjukkan bahwa tidak semua materi kimia yang dipelajari disertai dengan praktikum atau proses penemuan, terdapat materi yang hanya dipelajari dengan cara penugasan untuk membaca dan menghafal, sebagai contoh adalah materi koloid.

Pelaksanaan pembelajaran kimia di sekolah berpedoman pada kurikulum. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (UU No. 20, 2003, hlm.10). Sesuai dengan prinsip tersebut, pelaksanaan pembelajaran di sekolah seharusnya disertai dengan pemanfaatan potensi daerah masing-masing.

Potensi lokal adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah (Asmani, 2012, hlm.29; Ahmadi, dkk, 2012, hlm.1). Dalam penelitiannya, Hatimah (2006, hlm.42) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis potensi lokal dapat diimplementasikan secara efektif dan berdaya guna. Berdasarkan hasil wawancara siswa di Kabupaten Pandeglang, informasi potensi yang terdapat di daerahnya belum diberikan pada saat pembelajaran, padahal menurut mereka informasi tersebut sangat penting, karena selain memberikan kesempatan belajar kimia, siswa juga mengetahui potensi di daerah siswa sendiri.

Salah satu Kabupaten yang terdapat di Indonesia adalah Kabupaten Pandeglang. Satu dari

delapan kabupaten atau kota di Banten, Kabupaten Pandeglang lebih berpeluang menjadi sentra daerah pertanian dan peternakan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pandeglang, 2013, hlm.1). Begitu pula dalam data BPS Kabupaten Pandeglang (2014, hlm.10) tercatat bahwa Kabupaten Pandeglang adalah daerah yang memiliki potensi sektor pertanian dan pariwisata. Pernyataan ini juga didukung oleh data BPS Kab. Pandeglang (2015, hlm.56) bahwa 41,67% penduduk Kabupaten Pandeglang bekerja di sektor pertanian.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Pandeglang secara umum berupa potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), geografis dan budaya. Ketiga potensi tersebut adalah bagian dari alam. Kimia adalah ilmu yang termasuk rumpun IPA, dengan mempelajari IPA diharapkan siswa mampu mempelajari diri sendiri dan alam sekitar (BSNP, 2006, hlm. 177). Salah satu materi kimia yang berkaitan dengan alam adalah koloid. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan siswa, belum terdapat bahan ajar kimia yang mencantumkan potensi lokal. Padahal, keberadaan potensi lokal yang beragam dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian dalam pembelajaran (Arinto, 2014, hlm.1). Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengembangkan modul koloid berorientasi potensi lokal Kabupaten Pandeglang.

## **1. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE, terdiri dari tahap analisis (Analyze), Disain (Design), Pengembangan (Develop), Implementasi (Implement), dan Evaluasi (Evaluate) (Branch, 2009, hlm.2). Proses dan data yang diperoleh selama penelitian dideskripsikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, wawancara, validasi, serta angket respon guru dan siswa. Data potensi Kabupaten Pandeglang diperoleh dari hasil studi literatur serta wawancara dengan Beberapa Dinas dan pelaku usaha yang mengelola potensi Kabupaten Pandeglang.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aktivitas penelitian dimulai dari tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis kesenjangan kinerja dengan melakukan studi literatur dan studi langsung tentang ketersediaan potensi Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil studi literatur diketahui bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pada aspek SDA, SDM, geografis, historis, dan budaya. Selanjutnya, data studi literatur diperkuat keabsahannya dengan melakukan studi langsung berupa wawancara dengan pemerintahan daerah dan pelaku usaha yang memanfaatkan potensi yang teridentifikasi, informasi tersebut diperlukan untuk mendukung konten yang akan dicantumkan dalam modul. Berdasarkan hasil studi literatur dan studi langsung diketahui potensi Kabupaten Pandeglang secara umum terdapat pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.

Hasil studi literatur dan studi langsung dijadikan dasar untuk menentukan materi yang akan dicantumkan dalam modul. Pemilihan materi dilakukan dengan mengkaji SK/KD yang pada umumnya berkaitan dengan potensi yang teridentifikasi (Ahmadi, dkk, 2012, hlm.169-170), materi yang dipilih pada modul adalah materi sistem koloid. Selanjutnya, dilakukan analisis keterkaitan potensi Pandeglang dengan materi

sistem koloid, analisis ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi dengan ahli untuk mengetahui kevalidan hasil analisis.

Berdasarkan hasil studi literatur dan studi langsung serta hasil analisis keterkaitan potensi Kabupaten Pandeglang dengan sistem koloid diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa potensi Kabupaten Pandeglang yang berkaitan dengan materi sistem koloid, sehingga dapat dijadikan sebuah bahan ajar kimia di sekolah. Hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian Sumarti, dkk (2014, hlm.42) bahwa modul koloid berorientasi keunggulan lokal yang telah digunakan dalam pembelajaran valid dan efektif.

Beberapa potensi Kabupaten Pandeglang dan pemanfaatannya yang dapat dikaitkan dengan sistem koloid diantaranya padi, talas Beneng, kedelai, ubi kayu, kelapa, sawit, karet, telur itik, ternak besar, rumput laut, dan budidaya ikan air tawar yang termasuk dalam potensi SDA, serta wisata pantai dan PLTU Labuan yang berlatar belakang memanfaatkan wilayah perairan termasuk dalam potensi geografis, dan tokoh yang mengelola beberapa potensi SDA seperti pengelola talas Beneng dan ubi kayu termasuk dalam potensi SDM.

Selanjutnya, peneliti menentukan materi yang sesuai dengan potensi Kabupaten Pandeglang yang teridentifikasi, yang tergambar dalam tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan modul pembelajaran koloid yang mencantumkan informasi potensi lokal Kabupaten Pandeglang serta pemanfaatannya pada materi koloid. Tujuan yang telah disusun selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan instruksional yang menjadi gambaran garis besar konten modul.

Setelah garis besar konten modul terancang serta informasi mengenai karakter siswa terkumpul, selanjutnya peneliti mengidentifikasi sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan proses pengembangan. Selain itu, dilakukan analisis SK dan KD materi sistem koloid sehingga menghasilkan indikator pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari modul dan garis besar sub materi yang akan dicantumkan dalam modul.

Berbekal pada panduan pengembangan indikator menurut BSNP (2010), Indikator pembelajaran yang dihasilkan pada analisis SK dan KD selanjutnya digunakan untuk mendesain bentuk kegiatan pembelajaran untuk menggunakan modul, desain tersebut tergambar dalam bentuk strategi atau sistem penyampaian. Sistem penyampaian yang disusun disesuaikan dengan kompetensi PBKL (Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal). Langkah terakhir pada tahap analisis adalah menyusun rencana proses pengembangan dalam bentuk *time schedule*.

Tahap desain adalah awal bagi peneliti menuangkan ide dalam bentuk desain awal modul. Pada tahap analisis SK dan KD dihasilkan indikator pembelajaran, materi sistem koloid dikelompokkan menjadi 4 kegiatan pembelajaran.

Analisis konten dilakukan pada awal tahap desain, aktifitas yang dilakukan yaitu menganalisis konten potensi Kabupaten Pandeglang yang berkaitan dengan indikator pembelajaran dan materi sistem koloid, selanjutnya indikator tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, tugas, sub materi dalam modul, konten potensi Kabupaten Pandeglang yang berkaitan dengan sistem koloid, serta potensi lokal yang berhubungan. Selain itu, dilakukan pula perumusan evaluasi. Setelah konten dan evaluasi yang akan dicantumkan telah tersedia, selanjutnya dilakukan pemilihan format modul yang berisi elemen mutu

modul. Diantara elemen mutu modul dimaksud yaitu format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi kosong, dan konsistensi (Daryanto, 2013, hlm.13).

Modul yang disusun terdiri dari halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, peta kedudukan modul, peta konsep, pendahuluan, kegiatan pembelajaran, evaluasi, kunci jawaban, daftar pustaka, glosarium, lampiran dan biografi penulis (Daryanto, 2013, hlm.25-26).

Setiap bagian kegiatan belajar dalam modul tercantum informasi potensi Kabupaten Pandeglang yang berkaitan dengan uraian materi yang disampaikan. Sebagai pada kegiatan belajar 2 materi jenis-jenis koloid, potensi yang dicantumkan yaitu kue jojorong yang merupakan makanan khas Kabupaten Pandeglang.

Pada kegiatan belajar juga terdapat tugas, kegiatan eksperimen, kolom kompetensi keunggulan lokal, kolom ayo cari tahu, kolom info daerah, kolom motivasi, rangkuman, latihan soal dan petunjuk menilai latihan soal. Tugas, eksperimen, dan kompetensi keunggulan lokal yang dicantumkan dirumuskan berdasarkan tinjauan indikator pembelajaran dan hasil identifikasi indikator PBKL yang dapat muncul dari indikator pembelajaran yang diharapkan.

Pada bagian akhir modul terdapat evaluasi akhir, kunci jawaban cek penguasaan standar kompetensi, latihan soal dan evaluasi akhir, daftar pustaka, glosarium, lampiran, serta biografi penulis. Setelah draft modul awal selesai dirancang dan sebelum melakukan validasi pada tahap pengembangan, selanjutnya dilakukan koreksi oleh dosen pembimbing baik dari segi isi dan materi, bahasa, serta grafis penyajian.

Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan, peneliti melakukan diskusi dengan dosen ahli evaluasi terhadap tugas dan praktikum, melakukan

validasi modul pada dosen ahli materi, ahli pendidikan, dan tiga guru kimia di Kabupaten Pandeglang, menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), serta melakukan validasi angket respon guru dan siswa.

Saran yang paling dominan terhadap modul yaitu mengenai konten materi, konsistensi istilah, ejaan, dan tipografi isi modul. Terdapat konten materi yang mengalami perubahan, baik berupa tambahan informasi, hingga dihilangkan dalam konten. Penggunaan bahasa dan tipografi pun salah satu komponen yang memiliki banyak perhatian validator, terdapat beberapa kata yang terjadi kesalahan ejaan maupun penggunaan bahasa yang kurang komunikatif sehingga diperlukan perbaikan. Saran dan masukan validator kemudian dijadikan bahan untuk merevisi draf modul sehingga dihasilkan modul yang siap diuji coba.

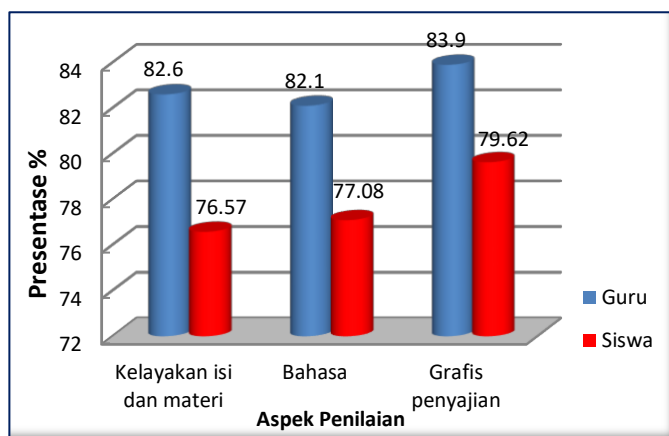
Setelah validasi selesai dilakukan, selanjutnya dibuatlah RPP untuk mensimulasikan penggunaan modul di dalam kelas. Penyusunan kegiatan pembelajaran dalam RPP didasarkan pada konten yang terdapat dalam modul.

Setelah validasi dan RPP selesai, selanjutnya dilakukan tahap implementasi, yaitu dengan melakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan dengan menggunakan modul dalam pembelajaran di kelas, serta meminta penilaian 5 guru terhadap modul yang dikembangkan. Setelah pembelajaran selesai dilakukan, peneliti melakukan tahapan evaluasi dengan cara menyebarkan angket respon siswa dan angket respon guru. Kuisisioner atau angket disebarkan pada 33 siswa yang telah melakukan

pembelajaran menggunakan modul dan 5 guru kimia yang telah membaca dan mengoreksi modul.

Presentase penilaian guru dan siswa menggunakan angket respon guru dan siswa dapat ditinjau pada gambar berikut :

**Gambar 1.** Presentase Rata-Rata Penilaian Tiap Aspek



Baik respon guru maupun siswa menunjukkan hasil tertinggi terhadap grafis penyajian dibandingkan dua aspek lainnya. Butir pernyataan yang mendapat nilai tertinggi yaitu “Ilustrasi dan gambar yang digunakan dapat mempermudah mempelajari koloid”. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan memiliki karakter *user friendly*, karena menurut Widodo dan Jasmadi (2008, hlm.53) bahan ajar yang memiliki karakter *user friendly* secara umum pengorganisasian antara isi dan ilustrasinya (seperti gambar) ditujukan untuk kemudahan peserta didik ketika memanfaatkannya. Serta butir pernyataan “Ilustrasi dan gambar sesuai dengan materi”. Dengan terpilihnya butir pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa modul yang

dikembangkan memiliki sifat *self instructional*, karena modul yang memiliki sifat tersebut tercantum contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan terhadap materi yang diterangkan (Daryanto, 2013, hlm.9).

Butir pernyataan yang mendapatkan penilaian guru dengan presentase paling rendah pada aspek grafis penyajian adalah sub aspek tata letak dengan butir pernyataan "Tata letak materi, gambar, tabel, dan halaman, proporsional" dengan presentase 70 % kriteria cukup baik, begitupula dengan angket respon siswa yang menunjukkan presentase penilaian paling rendah adalah sub aspek tata letak dengan butir pernyataan "Tata letak materi, gambar, tabel, dan halaman, proporsional" dan butir pernyataan "Penomoran tabel, gambar, dan halaman terurut, benar, dan konsisten, dengan presentase penilaian masing-masing 76.51% termasuk kategori sangat baik.

Selanjutnya respon guru dan siswa terhadap aspek kebahasaan menempati presentase penilaian dengan posisi kedua, yaitu sebesar 82.5% dan 77.08% dengan kategori sangat baik. Hal serupa diperoleh dalam penelitian Jannah dan Dwiningsih (2013, hlm. 177) pada penilaian komponen bahasa memperoleh kategori layak dengan presentase 85.4%. Butir pernyataan yang memiliki persentase tertinggi berdasarkan penilaian siswa yaitu aspek kesederhanaan bahasa penulisan yaitu sebesar 81.81% yang berkategori sangat baik dengan butir pernyataan "Modul ini sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti".

Begitupula dengan presentase penilaian guru, aspek kesederhanaan bahasa penulisan mendapatkan nilai tertinggi. Butir pernyataan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah "Bahasa yang digunakan dalam modul komunikatif dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa" dan

pernyataan "Kalimat yang digunakan dalam modul mudah dimengerti" dengan masing-masing presentase penilaian sebesar 85% dengan kategori sangat baik. Dengan terpilihnya butir pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa modul yang dikembangkan memenuhi sifat *user friendly* yaitu modul sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti (Widodo dan Jasmadi dan Jasmadi, 2008, hlm.52) serta memenuhi sifat *self instruction* karena modul telah menggunakan bahasa yang cukup sederhana serta komunikatif (Widodo dan Jasmadi, 2008, hlm.50).

Presentase penilaian terendah respon guru untuk aspek bahasa yaitu pada sub aspek kejelasan bahasa penulisan, pada butir "Kalimat yang digunakan telah sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)", butir "Secara umum paragraf dalam modul memiliki gagasan utama sehingga informasi yang disampaikan jelas", dan butir "Kata dan kalimat yang digunakan dalam modul tidak menimbulkan multitafsir" dengan masing-masing presentase penilaian sebesar 80% dengan kategori sangat baik. Walaupun butir tersebut mendapatkan penilaian terendah, tapi masih tergolong kategori sangat baik, artinya modul yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kebahasaan, karena menurut Daryanto (2013, hlm. 49) paragraf yang ditulis dalam modul hendaknya menuju pada satu pokok pikiran yang dikandung oleh kalimat utama.

Presentase penilaian terendah siswa terhadap aspek bahasa yaitu pada sub aspek kejelasan bahasa penulisan butir pernyataan "Kata dan kalimat dalam modul tidak menimbulkan makna ganda" yaitu sebesar 71.21% dengan kategori cukup baik. Meskipun presentase butir tersebut mendapatkan presentase penilaian terendah tapi masih termasuk kategori cukup baik, artinya

bahasa yang digunakan dalam modul tidak menimbulkan makna ganda.

Selanjutnya presentase tertinggi penilaian guru pada aspek kelayakan isi dan materi yaitu sub aspek keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran dengan presentase tertinggi butir “Adanya petunjuk penilaian latihan soal dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan belajar secara mandiri” yaitu sebesar 90% dengan kategori sangat baik. Petunjuk penilaian latihan soal dicantumkan dengan tujuan agar siswa mampu secara mandiri menilai kemampuannya setelah mempelajari modul, selain itu juga dalam petunjuk penilaian terdapat umpan balik atas penilaian yang dilakukan oleh peserta didik. Adanya umpan balik tersebut menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan bersifat self assessment (Daryanto, 2013, hlm. 10). Aspek penilaian terendah pada aspek kelayakan isi dan materi adalah pada sub aspek materi dalam modul, butir pernyataan “Informasi yang disajikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa kini” dengan presentase penilaian sebesar 75% dengan kategori sangat baik. Sedangkan butir pernyataan yang menyatakan bahwa “Modul ini menarik untuk dipelajari karena di dalamnya terdapat materi, tugas, praktikum dan soal yang terkait dengan potensi Pandeglang mendapat presentase penilaian sebesar 85% dengan kategori sangat baik.

Berbeda dengan presentase penilaian guru terhadap modul yang dikembangkan, presentase penilaian siswa tertinggi terhadap modul pada aspek kelayakan isi dan materi yaitu pada sub aspek materi dalam modul, dengan butir pernyataan tertinggi sebesar 89.39% yaitu pernyataan “Modul ini menarik karena terdapat

materi, tugas, dan latihan soal yang terkait dengan potensi di Kabupaten Pandeglang”. Hal ini dikarenakan sebagian responden menilai bahwa belajar menggunakan modul koloid berorientasi potensi Kabupaten Pandeglang ini menarik karena selain mempelajari sistem koloid, mereka juga mengetahui potensi yang terdapat di daerah mereka sendiri.

Presentase penilaian terendah yaitu aspek panduan pengguna, butir pernyataan “Peta konsep dalam modul dapat membantu memahami isi modul” yaitu sebesar 64.39% dengan kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan pada peta konsep masih terdapat konsep yang belum tercantum dalam modul, hal demikian tergambar dari tanggapan guru yang menyatakan bahwa “Aerosol pada materi jenis-jenis koloid perlu dicantumkan dalam peta konsep”. Tanggapan guru tersebut oleh peneliti dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki modul.

Berdasarkan hasil analisis data angket respon guru secara keseluruhan, memperoleh presentase rata-rata sebesar 82.87%, kemudian hasil analisis data angket respon siswa memperoleh presentase rata-rata sebesar 77.76%. Apabila presentase interval skor 76% sampai 100% termasuk kategori sangat baik (Anshori dan Iswati, 2009, hlm. 73). Berdasarkan respon guru dan siswa diketahui bahwa modul koloid berorientasi potensi lokal Kabupaten Pandeglang termasuk kategori sangat baik.

### **3. KESIMPULAN**

Modul koloid berorientasi potensi lokal Kabupaten Pandeglang dikembangkan

menggunakan model ADDIE. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan pengolahan data angket respon guru terhadap modul berorientasi potensi lokal Kabupaten Pandeglang termasuk pada kategori sangat baik dengan presentase penilaian 81.87%. Begitupula respon siswa termasuk kategori sangat baik dengan rata-rata presentase penilaian sebesar 77.76%, dengan aspek kelayakan isi dan materi, bahasa, dan grafis penyajian masing-masing mendapatkan hasil penilaian sebesar 76.57%, 77.08%, dan 79.62%.

#### 4. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan tidak terlepas dari kontribusi tenaga dan pikiran beberapa pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada: (1) Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan informasi ketersediaan potensi kabupaten Pandeglang., (2) Beberapa pelaku usaha yang berkontribusi mengelola dan mengolah potensi Kabupaten Pandeglang., (3) Validator modul dan instrument penilaian modul., (4) Kepala Sekolah, guru kimia, serta kelas XI IPA MAN Pandeglang., (5) Salamah Agung, M.A., Ph.D selaku reviewer jurnal ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, I. K., Amri, S., dan Elisah, T. (2012). *Mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam KTSP*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Arinto, S. (2014). *Pengembangan modul IPA terpadu berpotensi lokal berbasis multiple intelegences*. (Skripsi). Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2014). *Statistik daerah Kabupaten Pandeglang 2014*. Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang.

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). *Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: BSNP.

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). *Panduan pengembangan indikator*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.

Branch, R. M. (2009). *Instructional design the ADDIE approach*. New York: Springer.

Daryanto. (2013). *Menyusun modul bahan ajar untuk persiapan guru mengajar*. Yogyakarta: Gava Media.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pandeglang. (2013). *Rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang tahun 2013*. Pandeglang: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pandeglang.

Direktorat Pembinaan SMA. (2010). *Juknis pengembangan bahan ajar*. Jakarta: Depdikbud.

Hatimah, I. (2006). Pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM. *Mimbar Pendidikan*, 1 (XXV), hlm. 39-45.

Jannah, D. F., dan Dwiningsih, K. (2013). Kelayakan Buku Ajar Kimia Berorientasi Quantum Learning pada Materi Pokok Kimia Unsur untuk Siswa Kelas XII SMA. *Unesa Journal of Chemical Education*. 2(2), hlm. 173-180.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2015). *Pandeglang dalam angka 2015*. Pandeglang: BPS Kab.Pandeglang.

Munadi, Y. (2012). *Media pembelajaran sebuah pendekatan baru*. Jakarta: Gaung Persada.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013  
tentang Implementasi Kurikulum.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang  
Buku.

Sumarti, S.S; Supartono. dan Diniy, H.H. (2014).  
Material module development of colloid  
orienting on local advantage based chemo  
entrepreneurship to improve students' soft  
skill. *International Journal of Humanities  
and Management Science (IJHMS)*, 2 (1),  
hlm. 42-46.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20  
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional.

Widodo, C. S. dan Jasmadi. (2008). *Panduan  
menyusun bahan ajar berbasis kompetensi*.  
Jakarta: PT Elex Media Komputindo.



*Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Anang, Dirlanudin, Yearry)*  
**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK**

**PADA WEBSITE BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN**

Anang Zakaria, Dirlanudin, Yearry Panji Setianto

Prodi Manajemen Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang

E mail: [anzak3600@gmail.com](mailto:anzak3600@gmail.com)

*Abstract*

*The Central Bureau of Statistics (BPS) as one of the government agencies has the task of collecting and disseminating statistical information has also been utilizing ICT by creating websites ranging from central, provincial to district / city. This study aims to evaluate the implementation of BPS website of Banten Province with a quantitative approach using the success model of DeLone & McLean information system (1992). The model used involves 5 (five) variables: System Quality, Information Quality, Use, User Satisfaction and Individual Impact. Respondents in this study were visitors of Integrated Statistics Service (PST) at BPS office of Banten Province using non probability sampling technique that is convenience sampling. From the results of questionnaires the number of samples was 97 respondents. The analysis method used in this research is Partial Least Square (PLS) which is part of Structural Equation Model (SEM). Of the eight hypotheses there are 3 hypotheses that are not supported by the data have influence between variables, ie no significant effect of the Quality of System Variables on Use, there is no significant effect of Use on User Satisfaction and no significant influence of User Satisfaction on Use. The total coefficient of determination (R-square) for the model obtained is 47.6% which means that the variation of Individual Impact variables can be explained by the variable of System Quality and Information Quality through Use and User Satisfaction of 47.6% while the rest or 52.4 % is explained by other factors outside the model. The conclusion that can be taken is based on the coefficient of total determination can be said that the BPS website of Banten Province quite effective in providing individual impact. Suggestions that can be given based on research to improve the effectiveness of the BPS website of Banten Province is to improve the quality of information submitted than the improvement of system quality.*

*Keywords: e-Government, DeLone & McLean Success Model, System Quality, Information Quality, Usage*

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan dampak yang luar biasa dalam banyak sisi kehidupan manusia. Kemudahan yang diperoleh dari perkembangan TIK membawa perubahan dalam gaya hidup

manusia. Selain itu kemajuan TIK juga merambah dalam dunia perdagangan, transaksi keuangan, pertukaran informasi dan bahkan pelayanan publik. Meski demikian pemanfaatan kemajuan TIK tidak sepenuhnya berhasil memuaskan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan TIK terutama ditandai dengan kemajuan dalam teknologi komputer, baik dari sisi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya keahlian manusia (*brainware*). Salah satu kemajuan dunia komputer yang banyak dimanfaatkan manusia adalah teknologi komunikasi berbasis web. Pada 30 April 1993 untuk pertama kalinya CERN sebagai penemu teknologi web mengumumkan bahwa teknologi *World Wide Web* atau WWW bisa digunakan secara gratis oleh semua orang. CERN adalah sebuah organisasi penelitian nuklir yang berkedudukan di Eropa (perbatasan Perancis dan Swiss). Kata CERN adalah singkatan dalam bahasa Perancis yaitu *Conseil Européene pour la Recherche Nucléaire*, yakni organisasi yang didirikan untuk membicarakan pembangunan penelitian fisika nuklir di Eropa (Connolly, 2000). Dengan demikian sudah hampir 25 tahun sejak pertama dideklarasikan oleh direktur CERN teknologi WWW dan internet bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh manusia.

Bagi pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik membawa keuntungan dengan kemajuan TIK. Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan adalah dengan pembangunan *electronic government* atau *e-government*. Tonggak pengembangan *e-government* di Indonesia dimulai dengan terbentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50

Tahun 2000. Sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia bahwa TKTI diberikan kewenangan dalam mengkoordinasikan pengembangan dan pendayagunaan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) seluruh jajaran di pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government.

Setelah pemerintah menetapkan kebijakan dan pengembangan *e-government* maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Direktorat e-Government menyelenggarakan pemerinkatan *e-government* Indonesia (PeGI). Penyelenggaraan PeGI sudah diadakan sejak tahun 2012. PeGI melakukan penilaian terhadap *e-government* milik pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga (<http://pegi.layanan.go.id>). Adapun dimensi penilaian PeGI yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Sedangkan target atau cakupan PeGI meliputi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014 dan 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat penilaian terbaik atau peringkat 1 di antara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam penilaian

PeGI. Sedangkan pada tahun 2013 peringkat BPS pada posisi ke-7 dari 19 lembaga. Nilai terendah pada peringkat 7 tersebut karena rendahnya nilai aspek perencanaan di BPS.

Sejak pertengahan tahun 1990-2000an BPS telah membangun dan menggunakan website sebagai sarana untuk penyebaran informasi produk BPS. Sedangkan khusus Provinsi Banten awal pembuatan website mulai dilakukan sejak tahun 2003 yang

secara perlahan dan terus menerus dilakukan perbaikan. Meski BPS mendapat penilaian PeGI dengan peringkat terbaik pada tahun 2014-2015 namun dari tahun 2015-2017 terjadi penurunan jumlah pengguna web di beberapa provinsi termasuk Banten. Berikut adalah tabel yang memuat jumlah pengunjung website BPS di beberapa provinsi di Jawa dan luar Jawa.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Website BPS di Beberapa Provinsi Tahun 2015-2017

Provinsi	2015	2016	2017	Jumlah
Banten	48.309	69.878	20.408	138.595
Jawa Timur	143.107	202.407	62.288	407.802
DI Yogyakarta	78.772	106.477	29.100	214.349
Jawa Tengah	139.397	194.715	82.938	417.050
Jawa Barat	105.647	151.046	42.140	298.833
DKI Jakarta	132.356	162.593	48.275	343.224
Bali	99.676	122.392	33.496	255.564
Sumatera Selatan	46.578	63.749	31.987	142.314
Sulawesi Selatan	31.582	73.835	43.902	149.319
Kalimantan Timur	61.694	79.958	26.951	168.603

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan rekapitulasi pengunjung website BPS di Jawa dan beberapa provinsi besar di luar Jawa terlihat bahwa jumlah pengunjung web di Banten paling rendah dalam kurun waktu tahun 2015-2017. Selama 3 tahun tersebut jumlah pengunjung web BPS Provinsi Banten menurun terus, bahkan di tahun 2017 menurun sangat tajam, namun kondisi ini juga terjadi di provinsi lain. Dengan total pengunjung web BPS selama 2015-2017 sebanyak 138.595

pengunjung web BPS Provinsi Banten masih lebih rendah dibanding beberapa provinsi di luar Jawa seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur (Tabel 1). Dengan kondisi itulah penelitian ini mengambil lokasi di BPS Provinsi Banten.

Sejak sekitar tahun 2013/2014 secara bertahap BPS membangun *template* website yang digunakan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan tampilan dan menu yang seragam diharapkan

memudahkan pengguna web dalam mendapatkan data dan informasi yang diinginkan. Sebab pada dasarnya setiap pengembang web atau *web developer* ingin website yang dibuatnya bisa dimanfaatkan oleh pengguna secara maksimal atau dengan kata lain ada kesuksesan terhadap website yang dibangun. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan model kesuksesan sistem informasi e-government BPS dalam hal ini website BPS Provinsi Banten (<https://banten.bps.go.id>). Dalam penelitian ini menggunakan DeLone & McLean *Model of Information System Success* (D&M Model of IS Success) (DeLone & McLean, 1992; Jogiyanto, 2007) dalam menganalisis kesuksesan sistem informasi pelayanan publik pada website BPS Provinsi Banten.

#### **Tinjauan Pustaka**

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi (SI) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Sistem Informasi elektronik merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,

menganalisis, menampilkan, dan/atau menyebarkan informasi secara elektronik.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 disebutkan bahwa e-government (*electronic government*) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah. Pelayanan tersebut dapat berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain.

Penelitian Haque, Pathrannarakul & Phinaitrup (2012) menunjukkan bahwa organisasi pemerintah yang telah menerapkan e-government pada dasarnya menuju modernisasi organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi fungsional dan efektivitas dalam operasi bisnis pemerintah dan meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah federal dan provinsi. Haque, et al (2012) melakukan penelitian terhadap pegawai pemerintah di berbagai tingkatan yang terlibat langsung dalam implementasi aplikasi e-government di Pakistan.

Terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dimaksudkan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dapat

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 2 di bawah ini merupakan ringkasan tujuan dan manfaat Pengembangan e-Government yang termuat dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Tabel 2. Manfaat Pengembangan e-Government bagi Pengguna

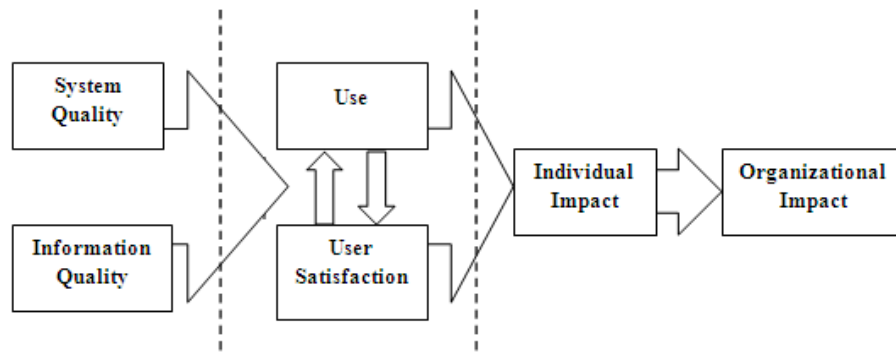
Pengguna	Manfaat
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kepuasan masyarakat</li> <li>• Layanan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>• Tidak dibatasi waktu layanan</li> <li>• Biaya layanan yang terjangkau</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan negara</li> </ul>
Pemerintah	Kelancaran transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom (horisontal dan vertikal)
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan perekonomian nasional</li> <li>• Peningkatan kemampuan dalam menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional</li> </ul>

Sumber: Inpres No. 3 Tahun 2003

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (1992) dibangun berdasarkan teori dan hasil riset yang dilakukan oleh banyak peneliti pada kurun waktu 1970an hingga 1980an. Dalam rancangan modelnya, DeLone dan McLean (1992) membagi kesuksesan sistem informasi ke dalam 6 (enam) dimensi pengukuran

(Gambar 1), yaitu: *System Quality* (Kualitas Sistem), *Information Quality* (Kualitas Informasi), *Use* (Penggunaan), *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna), *Individual Impact* (Dampak Individu), dan *Organizational Impact* (Dampak Organisasi) (DeLone & McLean, 1992; Jogiyanto, 2007).

Gambar 1. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (1992)



Sumber: DeLone dan McLean (1992)

Pada tahun 2005 Iivari melakukan penelitian penerapan sistem keuangan dan akuntansi di pemerintah kota Oulu Finlandia. Iivari (2005) menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (1992). Dari 8 hipotesis yang diuji terdapat 2 hipotesis yang tidak didukung oleh data empiris, yaitu tidak ada pengaruh Kualitas Informasi Persepsian (*Perceived Information Quality*) terhadap Penggunaan Nyata (*Actual Use*) dan tidak ada hubungan antara Penggunaan Nyata (*Actual Use*) terhadap Dampak Individu (*Individual Impact*).

Purwanto (2007) melakukan penelitian terhadap penerapan e-government di Pemkab Sragen. Penelitian ini dimaksudkan memberikan bahan pendukung bagi auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa kinerja atas aplikasi e-government pemerintah daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kesuksesan sistem informasi yang dibuat oleh DeLone dan McLean. Hasil pengujian menggunakan model akhir menunjukkan bahwa aplikasi di Pemkab Sragen yang diuji menunjukkan hasil yang efektif. Namun ada beberapa aspek yang

perlu diperbaiki, seperti: fungsionalitas, lama respon dan format output serta efisiensi sistem informasi.

Pamugar, Winarno dan Najib (2014) melakukan penelitian Model Evaluasi Kesuksesan dan Penerimaan Sistem Informasi E-Learning pada Lembaga Diklat Pemerintah. Menurut Pamugar, et al (2014) ada perbedaan penerapan aplikasi e-learning di lingkup pemerintahan dengan di lingkungan perguruan tinggi. Perbedaan itu disebabkan karakteristik organisasi, proses bisnis organisasi, budaya organisasi dan karakteristik pelaku organisasi antara kondisi di pemerintah dan perguruan tinggi. Perbedaan tersebut membutuhkan model evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga diklat pemerintah, sehingga dapat menggambarkan kesuksesan dan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi e-learning. Dengan kondisi itulah penulis merancang model terintegrasi untuk meneliti efektifitas dan penerimaan sistem informasi e-learning.

Yuliana (2012) melakukan penelitian tentang evaluasi Sistem Informasi Pos Pada PT. Pos Indonesia. Penelitian ini bertujuan

untuk mengevaluasi sistem informasi pos yang diterapkan secara wajib atau *mandatory* dalam penggunaannya di PT. Pos Indonesia (persero) Divisi Regional VI Semarang menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean. Dari hasil evaluasinya terhadap penerapan SiPOS disimpulkan bahwa penggunaan wajib SiPOS bisa dikatakan efektif.

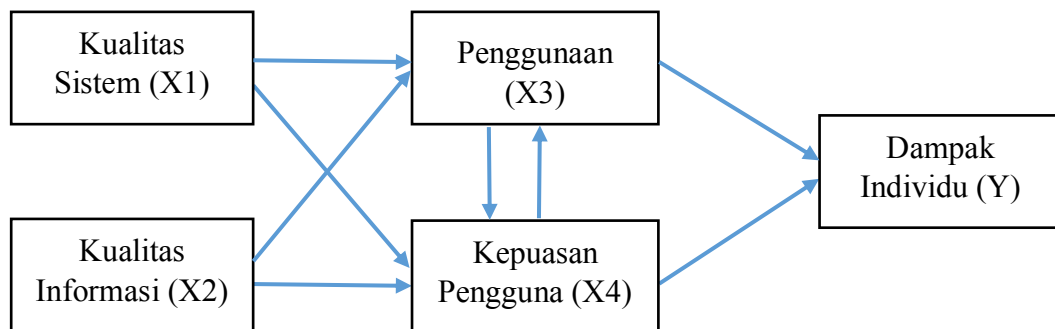
Irawan (2012) dalam penelitiannya untuk mengevaluasi kualitas website Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah WebQual. WebQual adalah salah satu metode pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi pengguna. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengevaluasi kualitas website Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan persepsi pengguna berupa kegunaan (*usability*), kualitas informasi, dan kualitas interaksi pelayanan. Tujuan yang kedua untuk mengetahui item-item pada dimensi yang mana dari WebQual yang berkontribusi paling besar dalam pengukuran kualitas website.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean (1992). Dalam penelitian ini model dari DeLone & McLean tidak menyertakan dampak organisasi. Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian ini, atau disebut sebagai model EFIS (*effectiveness of information system*).

Gambar 2. Model Penelitian (Model EFIS)



Berdasarkan model EFIS berikut adalah daftar hipotesis yang akan dilakukan pengujian.

Tabel 3. Daftar Hipotesis Yang Akan Diuji

Hubungan Teoritis	Hipotesis
Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi website BPS Prov. Banten secara sendiri-sendiri (partial) maupun bersama (simultan) mempengaruhi Penggunaan dan Kepuasan Pengguna	H1a: Kualitas Sistem website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Penggunaan.
	H1b: Kualitas Sistem website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.
	H2a: Kualitas Informasi website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Penggunaan.
	H2b: Kualitas Informasi website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.
Pengaruh Penggunaan website BPS Prov. Banten terhadap Kualitas Pengguna, dan sebaliknya	H3a: Penggunaan website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.
	H3b: Kepuasan Pengguna website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Penggunaan.
Penggunaan dan Kepuasan Pengguna website BPS Prov. Banten secara sendiri-sendiri (partial) maupun bersama (simultan) mempengaruhi Dampak Individu	H4a: Penggunaan website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Dampak Individu.
	H4b: Kepuasan Pengguna website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Dampak Individu.

Dalam operasionalnya ke 6 variabel dalam model EFIS perlu dirinci indikator-indikator pengukurannya sebab pada dasarnya variabel tersebut tidak dapat langsung dihitung

nilainya. Berikut adalah daftar indikator pengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Variabel, Dimensi dan Indikator Model EFIS

No.	Variabel dan Dimensi	Indikator	Referensi
1	Kualitas Sistem (X1)		
	Ketersediaan ( <i>availability</i> )	SI bisa diakses setiap saat	DeLone & McLean (1992)
	Integrasi sistem ( <i>integration</i> )	Sistem mampu berkomunikasi dengan SI yang lain	Supriatna (2012)
	Waktu respon ( <i>response time</i> )	Sistem mampu merespon permintaan pengguna dengan cukup cepat	DeLone & McLean (1992), Iivari (2005)
	Kegunaan ( <i>usability</i> )	SI mudah digunakan	DeLone & McLean



*Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Anang, Dirlanudin, Yearry)*

		SI menarik untuk digunakan	(1992)
Kenyamanan akses ( <i>convenience of access</i> )		SI kompatibel dengan berbagai browser populer	DeLone & McLean (1992), Iivari (2005), Jogiyanto (2007)
		SI bisa digunakan dengan mudah tanpa bantuan software khusus/tertentu	
		SI dapat digunakan tanpa grafik atau gambar untuk mempercepat akses	
		SI menyediakan menu dan fitur yang cukup lengkap dan mudah digunakan	
Bahasa ( <i>language</i> )		SI menggunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dipahami pengguna	Iivari (2005)
Efisiensi ( <i>efficiency</i> )		SI dapat menghemat waktu pengguna	Gable, et al (2003)
		SI dapat menghemat biaya pengguna	
Fungsionalitas ( <i>functionality</i> )		SI selalu bekerja dan berjalan dengan benar	Purwanto (2007)
		SI menyediakan instruksi yang membantu pengguna	
		SI menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk diunduh	
		SI menyediakan e-form yang berfungsi dengan baik	
Kemudahan jelajah ( <i>easy to explore</i> )		SI menyediakan pilihan navigasi yang jelas	Gable, et al (2003)
		SI menyediakan <i>link</i> di semua halaman untuk berpindah halaman dengan mudah	
Interaksi ( <i>interaction</i> )		SI menyediakan fitur untuk berinteraksi seperti <i>live chat</i> atau forum dengan baik	Purwanto (2007)

2	Kualitas Informasi (X2)		
	Kelengkapan ( <i>completeness</i> )	SI menyediakan informasi yang lengkap	DeLone & McLean (1992), Iivari (2005)
	Ketepatan ( <i>precision</i> )	SI menyediakan informasi yang tepat sesuai kebutuhan pengguna	Iivari (2005)
	Akurasi ( <i>accuracy</i> )	SI menyediakan informasi yang akurat	Iivari (2005)
	Konsistensi ( <i>consistency</i> )	SI menyediakan informasi yang konsisten	Gable, et al (2003)
	Kekinian ( <i>currency</i> )	SI menyediakan informasi terkini	DeLone & McLean (1992)
	Kepahaman ( <i>understandability</i> )	SI menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna	Gable, et al (2003)
	Bentuk keluaran ( <i>format of output</i> )	SI menyediakan output/keluaran dalam beberapa jenis format yang dapat dibaca dengan jelas dan layout yang baik	DeLone & McLean (1992), Gable, et al (2003)
3	Penggunaan (X3)		
	Frekwensi penggunaan ( <i>frequency of use</i> )	Pengguna akan lebih sering memakai SI	DeLone & McLean (1992), Iivari (2005)
	Pemanfaatan fitur ( <i>feature utilization</i> )	Pengguna akan lebih banyak memanfaatkan fitur yang ada di SI.	DeLone & McLean (1992)
4	Kepuasan Penggunaan (X4)		
	Kualitas sistem memuaskan ( <i>the system quality satisfactory</i> )	Pengguna puas terhadap kualitas sistem.	DeLone & McLean (1992)
	Kualitas informasi memuaskan ( <i>the information quality satisfactory</i> )	Pengguna puas terhadap kualitas informasi.	DeLone & McLean (1992)
	SI memuaskan ( <i>the information system satisfactory</i> )	Secara umum pengguna puas terhadap sistem informasi	Gable, et al (2003)

*Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Anang, Dirlanudin, Yearry)*

	SI menyenangkan ( <i>the information system pleases</i> )	Penggunaan merasa senang dalam menggunakan SI	DeLone & McLean (1992)
5	Dampak Individu (Y)		
	Informasi yang didapat menambah pengetahuan pengguna	SI memberikan tambahan pengetahuan bagi pengguna	DeLone & McLean (1992), Iivari (2005)
	Membantu penyelesaian pekerjaan/tugas	SI membantu dalam menyelesaikan pekerjaan/ tugas.	DeLone & McLean (1992), Iivari (2005)
	Meningkatkan kinerja	SI membantu dalam meningkatkan kinerja bagi pengguna	DeLone & McLean (1992), Iivari (2005)
	Efisiensi dan transparansi pelayanan publik	SI meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik	Inpres No. 3/2003

### Rancangan Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun kuesioner berdasarkan indikator di atas. Seluruh indikator diukur dengan menggunakan 4 (empat) skala Likert mulai dari “Sangat Tidak Setuju=1”, “Tidak Setuju=2”, “Setuju=3” dan “Sangat Setuju=4”. Sehingga data yang diperoleh memiliki skala pengukuran ordinal. Skala ordinal selain bisa digunakan untuk membedakan juga dapat digunakan untuk mengurutkan walaupun jarak antar titik skala dalam urutan tidak konsisten. Contoh skala ordinal adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi atau keinginan (Gudono, 2016).

Dalam pengumpulan data di lapangan penelitian ini menggunakan *non probability sampling*. Dengan memperhatikan unit

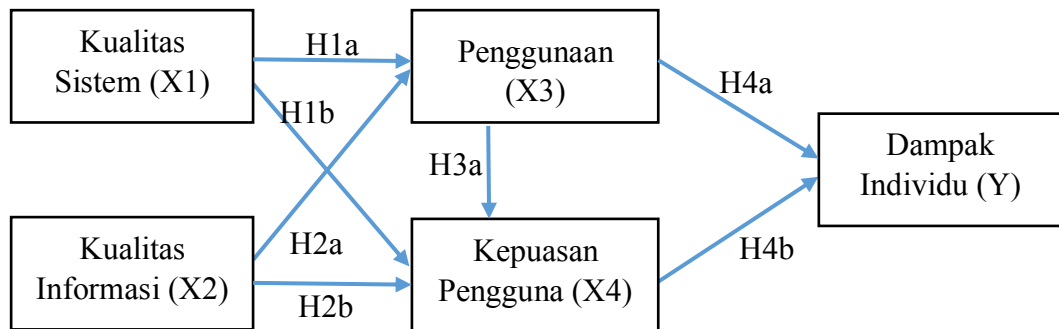
penelitian dan populasi maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* namun dengan tetap memperhatikan kriteria yang sesuai dengan penelitian ini. Cara ini adalah relatif memudahkan peneliti ketika kelompok orang yang diinginkan sulit ditemukan untuk dilakukan survei (Latham, 2007). Kriteria bahwa sampel tersebut layak digunakan dalam penelitian ini adalah jika pengunjung PST (Pelayanan Statistik Terpadu) di kantor BPS Provinsi Banten atau calon responden tersebut pernah menggunakan website BPS Provinsi Banten. Dalam praktiknya pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner langsung melalui *hardcopy* dan pengisian kuesioner

menggunakan e-form via email pengunjung yang telah mengisi buku tamu.

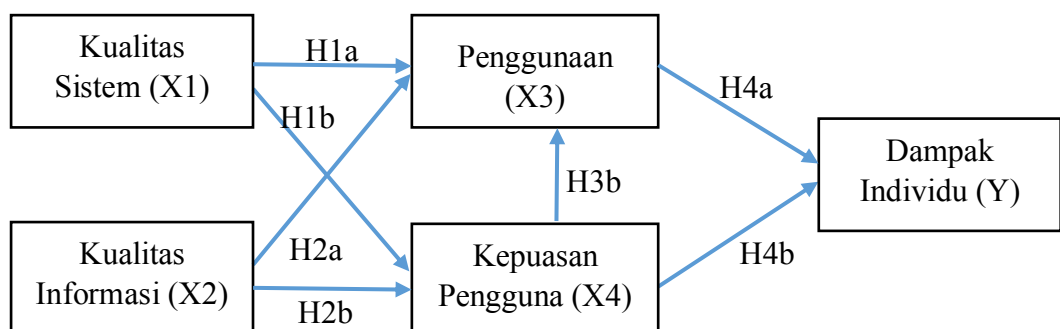
Penelitian ini menggunakan PLS (*Partial Least Square*) untuk membantu dalam penghitungan dan analisis data. Pemilihan PLS sebagai metode analisis data karena banyak kemudahan persyaratan yang diminta oleh PLS. Beberapa keunggulan PLS antara lain: jumlah data amatan yang diolah tidak harus banyak (bisa kurang dari 100), skala pengukuran boleh di bawah skala interval, tidak perlu adanya randomisasi data serta tidak diharuskan memenuhi asumsi kenormalan. Sedangkan paket program yang digunakan adalah SmartPLS 3.0 yang diunduh di <http://smartpls.de>.

Sehubungan dengan penggunaan metode PLS maka model EFIS harus dipecah menjadi 2 model karena PLS tidak dapat menghitung hubungan resiprokal dalam satu model.

Gambar 3. Model-1 EFIS

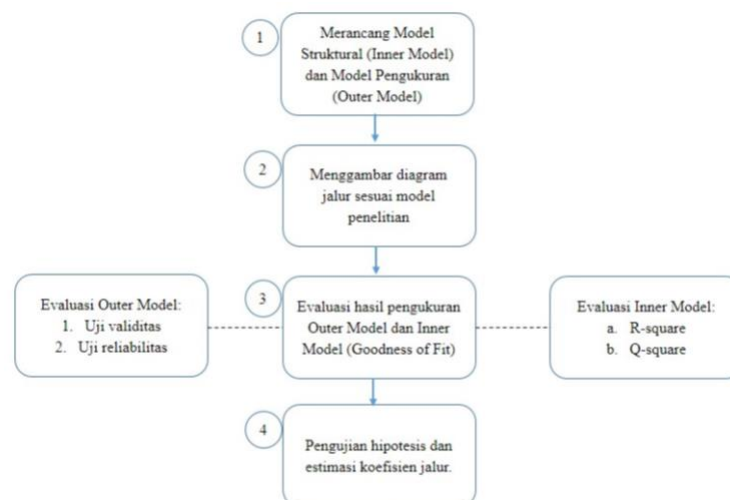


Gambar 4. Model-2 EFIS



Dalam penghitungan dan evaluasi model menggunakan SmartPLS ada prosedur yang harus dilalui.

Gambar 5. Diagram Prosedur Pengujian Dengan PLS



Sumber: Jaya & Sumertajaya (2008), Sarwono & Narimawati (2015)

Pada langkah-3 (*Goodness of Fit*) ada beberapa ukuran yang digunakan untuk evaluasi, yaitu:

▪ Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran)

- 1. Uji validitas

a. Convergent validity, berdasarkan nilai outer loading indikator

b. Discriminant validity, berdasarkan nilai cross loading indikator

c. Average Variance Extracted (AVE)

- 2. Uji reliabilitas

a. Composite reliability

## b. Cronbach's Alpha

Jika ditemukan dari pengujian di atas pada satu atau beberapa indikator yang tidak layak maka proses penghitungan harus diulang dengan mengeluarkan indikator tersebut dari model.

▪ Evaluasi Inner Model (Model Struktural)

a. R-square

b. Q-square (predictive relevance)

## 4. Hasil

Tidak dimasukkannya variabel Dampak Organisasi karena sebagian besar pengunjung PST adalah mahasiswa/pelajar (79,4%) yang tentu mereka tidak berada di bawah instansi atau lembaga tertentu. Berikut adalah tabel jumlah pengunjung PST selama tahun 2017 dirinci menurut jenis pekerjaan/profesi.

Tabel 5. Persentase Pengunjung PST Menurut Pekerjaan/Profesi Tahun 2017

Bulan	Pekerjaan/Profesi (%)				Total
	Mahasiswa/ Pelajar	Swasta	PNS/TNI/ Polri	Lainnya	
Januari	81,8	9,2	4,5	4,5	100,0
Februari	57,9	15,8	15,8	10,5	100,0
Maret	84,1	1,6	8	6,3	100,0
April	86,4	3,4	3,4	6,8	100,0
Mei	83,3	0	12,1	4,6	100,0
Juni	89,2	3,6	3,6	3,6	100,0
Juli	71,7	13,1	6,5	8,7	100,0
Agustus	69,1	7,3	9,1	14,5	100,0
September	72,7	3,1	12,1	12,1	100,0
Oktober	87,7	3,1	7,7	1,5	100,0
November	82,0	6,0	12,0	0	100,0
Desember	76,4	5,9	11,8	5,9	100,0
Total	79,4	5,5	8,7	6,4	100,0

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2018

### Karakteristik Responden

Dari pengumpulan data yang dilakukan hampir satu bulan diperoleh data amatan sebanyak 97 responden, dengan rincian 6 responden yang mengisi *hardcopy*

dan 91 responden berasal dari pengisian lewat e-form yang dikirim via email.

Berikut tabel karakteristik responden.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Jenis Karakteristik

Jenis Karakteristik	Uraian	Jumlah	Persentase
---------------------	--------	--------	------------

*Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Anang, Dirlanudin, Yearry)*

Jenis Kelamin	Laki-laki	54	55,7
	Perempuan	43	44,3
Usia	20 tahun atau kurang	7	7,2
	21 - 30 tahun	75	77,3
	31 - 40 tahun	10	10,3
	41 - 50 tahun	3	3,1
	Di atas 50 tahun	2	2,1
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	SMA atau sederajat	40	41,2
	Perguruan Tinggi	57	58,8
Pekerjaan/Profesi	Aparatur Sipil Negara/Pegawai BUMN/BUMD	19	19,6
	Pegawai Swasta/Pengusaha	8	8,3
	Mahasiswa/Pelajar	53	54,6
	Lainnya	17	17,5

Sumber: Data Penelitian (Diolah)

Berdasarkan Tabel 6 terlihat jumlah responden laki-laki (55,7%) lebih banyak dibanding perempuan (44,3%). Responden yang memberikan tanggapan sebagian besar berumur 21-30 tahun (77,33%) yang merupakan kelompok usia produktif diikuti kelompok usia 31-40 tahun (10,3%). Sebagian besar pendidikan responden adalah tamat perguruan tinggi (58,8%) sedangkan sisanya berpendidikan SMA/sederajat

sebanyak 41,2%. Lebih dari setengah jumlah responden memiliki profesi sebagai mahasiswa/pelajar (54,6%) kemudian diikuti profesi/pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai BUMN/BUMD (19,6%). Besarnya persentase mahasiswa/pelajar yang menjadi responden sejalan dengan jumlah pengunjung PST tahun 2017 yang didominasi oleh mahasiswa/pelajar (Tabel 5).

#### **Evaluasi Model Pengukuran**

Tabel berikut adalah kriteria untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas.

Tabel 7. Kriteria Pengujian Pada Model Pengukuran

Jenis Pengujian	Pengukuran	Rule of Thumbs
(1)	(2)	(3)

Uji validitas	Convergent validity	Outer loading $\geq 0,7$
	Discriminant validity	Cross loading pada variabel sendiri > dari pada ke variabel lain
	AVE	$\geq 0,5$
Uji reliabilitas	Composite reliability	$\geq 0,7$
	Cronbach's Alpha	$\geq 0,7$

Sumber: Jaya & Sumertajaya (2008), Sarwono & Narimawati (2015)

#### - Uji Validitas

Batasan umum yang digunakan dalam *convergent validity* untuk menentukan apakah suatu indikator valid adalah jika nilai outer loading  $\geq 0,7$ . Dari hasil penghitungan ada 11 indikator pada variabel Kualitas Sistem (X1) yang nilai outer loadingnya kurang dari 0,7 yaitu X1-1 (0,613), X1-2 (0,432), X1-3 (0,621), X1-6 (0,605), X1-7 (0,669), X1-8 (0,483), X1-11 (0,634), X1-12 (0,675), X1-13 (0,628), X1-17 (0,627), dan X1-20 (0,534). Hal itu didukung juga dengan hasil dalam *discriminant validity* yang membandingkan nilai cross loading setiap indikator suatu variabel terhadap nilai cross loading indikator itu pada

variabel lain. Ke-11 indikator tersebut memiliki nilai cross loading pada variabel X1 lebih kecil dibanding nilai cross loading indikator tersebut pada variabel lain. Dengan demikian 11 indikator tersebut dinyatakan tidak valid dan harus dieliminasi dari model-1 dan model-2, kemudian dilakukan penghitungan ulang.

Setelah dilakukan penghitungan ulang tanpa melibatkan 11 indikator yang tidak valid, baik dalam *convergent validity* maupun *discriminant validity* semua indikator dinyatakan valid. Hal tersebut juga didukung oleh nilai AVE semua konstruk.

Tabel 8. Nilai AVE, Cronbach's Alpha dan Composite Reliability Model EFIS

Variabel Laten	Average Variance Extracted (AVE)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kualitas Sistem (X1)	0,570*	0,905**	0,923**
Kualitas Informasi (X2)	0,644*	0,908**	0,927**
Penggunaan (X3)	0,835*	0,802**	0,910**
Kepuasan Pengguna (X4)	0,760*	0,895**	0,927**



*Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Anang, Dirnanudin, Yerry)*

Dampak Individu (Y)	0,730*	0,907**	0,931**
---------------------	--------	---------	---------

Keterangan: \* = Valid, \*\* = Reliabel

Nilai AVE untuk semua konstruk di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa semua konstruk atau variabel laten pada model adalah valid.

#### - Uji Reliabilitas

Reliabilitas variabel dihitung berdasarkan nilai Cronbach's Alpha dan composite reliability. Kriteria suatu variabel laten dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha dan composite reliability  $\geq 0,7$ . Pada Tabel 8 terlihat bahwa baik Cronbach's Alpha maupun composite reliability di atas 0,7 yang berarti bahwa konstruk pada model EFIS dikatakan reliabel.

Dengan demikian dalam evaluasi terhadap inner model atau model pengukuran berdasarkan hasil penghitungan seluruhnya memenuhi kriteria sebagai konstruk yang valid dan reliabel.

#### Evaluasi Model Struktural

Setelah diperoleh konstruk yang valid dan reliabel melalui pengujian pada outer model (model pengukuran), maka tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap model

struktural (inner model). Evaluasi atau pengujian kelayakan terhadap inner model atau model struktural dilihat pada nilai R-square ( $R^2$ ) dan Q-square ( $Q^2$ ). Interpretasi nilai R-square pada PLS menunjukkan besaran koefisien determinasi pada variabel endogen. Nilai R-square sebesar lebih dari 0,7 dikatakan kuat, 0,67 substansial, 0,33 moderat dan 0,19 lemah (Sarwono & Narimawati, 2015). Sedangkan nilai Q-square diperoleh dari perhitungan:

$Q^2 = 1 - (1-R_1^2)(1-R_2^2)\dots(1-R_p^2)$ , dimana p adalah banyaknya variabel endogen.

Kriteria pada Q-square adalah jika  $Q^2 > 0$  bahwa model memiliki relevansi prediktif, sedangkan jika  $Q^2 \leq 0$  menunjukkan tidak adanya relevansi prediktif. Nilai  $Q^2$  digunakan untuk melihat pengaruh model struktural terhadap pengukuran observasi untuk variabel laten endogen (Jaya dan Sumertajaya, 2008). Besaran  $Q^2$  ini setara dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur (*path analysis*).

Tabel 9. Nilai R-square dan Ajusted R-square Pada Variabel Laten Endogen

Variabel Laten Endogen	Model-1		Model-2	
	R-Square	Adjusted R-Square	R-Square	Adjusted R-Square
Dampak Individu (Y)	0,476	0,465	0,476	0,465
Kepuasan Pengguna (X4)	0,591	0,578	0,572	0,563
Penggunaan (X3)	0,488	0,477	0,511	0,496

Berdasarkan nilai R-square pada Tabel 9 terlihat bahwa semua variabel laten endogen memiliki koefisien determinasi yang tidak cukup kuat (kurang dari 0,7). Sedangkan dari perhitungan Q-square baik Model-1 maupun Model-2 diperoleh nilai yang sama yaitu 0,890. Dengan nilai Q2 di atas nol bahkan mendekati 1 berarti model mempunyai kelayakan *predictive relevance*.

Dengan demikian baik evaluasi atau pengujian pada outer model dan inner model menunjukkan hasil yang valid, reliabel dan memiliki relevansi prediktif yang cukup baik. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis dan estimasi koefisien jalur yang diperoleh dari perhitungan Bootstrapping.

### Pengujian Hipotesis dan Estimasi Koefisien Jalur

Tabel 10 dan Tabel 11 menunjukkan hasil pengujian terhadap pengaruh antar variabel laten baik Model-1 maupun Model-2 EFIS. Dari kedua tabel tersebut ditemukan bahwa tidak semua pengaruh antar variabel laten bersifat signifikan pada taraf nyata  $\alpha = 5\%$  atau  $t\text{-tabel} = 1,988$ . Hipotesis ditolak jika nilai  $t\text{-statistik}$  atau  $t\text{-hitung}$  ( $t_o$ ) lebih kecil dari  $t\text{-tabel}$  ( $t_a$ ) atau  $p\text{-value}$  lebih besar dari 0,05. Penolakan terhadap hipotesis menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis bahwa ada pengaruh antara satu variabel laten terhadap variabel laten lainnya. Di samping itu pada kedua tabel tersebut terdapat kolom yang berjudul Original Sample (O) yang menunjukkan arah dan nilai koefisien jalur variabel laten.

Tabel 10. Tabel Uji-t Hubungan Variabel Laten Model-1 EFIS

Hipotesis	Hubungan Variabel Laten	Original Sample (O)	t-Statistic	P Values	Kesimpulan (taraf 5%) *
H1a	Kualitas Sistem (X1) -> Penggunaan (X3)	0,301	2,281	0,023	Signifikan
H1b	Kualitas Sistem (X1) -> Kepuasan Pengguna (X4)	0,268	2,038	0,042	Signifikan
H2a	Kualitas Informasi (X2) -> Penggunaan (X3)	0,440	3,204	0,001	Signifikan
H2b	Kualitas Informasi (X2) -> Kepuasan Pengguna (X4)	0,391	2,571	0,010	Signifikan
<b>H3a</b>	<b>Penggunaan (X3) -&gt; Kepuasan Pengguna (X4)</b>	<b>0,193</b>	<b>1,692</b>	<b>0,091</b>	<b>Tidak Signifikan</b>

*Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Anang, Dirlanudin, Yearry)*

H4a	Penggunaan (X3) -> Dampak Individu (Y)	0,343	3,404	0,001	Signifikan
H4b	Kepuasan Pengguna (X4) -> Dampak Individu (Y)	0,421	4,675	0,000	Signifikan

Keterangan: \* = two tailed test

Tabel 11. Tabel Uji-t Hubungan Variabel Laten Model-2 EFIS

Hipotesis	Hubungan Variabel Laten	Original Sample (O)	t-Statistic	P Values	Kesimpulan (taraf 5%) *
<b>H1a</b>	<b>Kualitas Sistem (X1) -&gt; Penggunaan (X3)</b>	<b>0,225</b>	<b>1,580</b>	<b>0,115</b>	<b>Tidak Signifikan</b>
H1b	Kualitas Sistem (X1) -> Kepuasan Pengguna (X4)	0,325	2,659	0,008	Signifikan
H2a	Kualitas Informasi (X2) -> Penggunaan (X3)	0,330	2,126	0,034	Signifikan
H2b	Kualitas Informasi (X2) -> Kepuasan Pengguna (X4)	0,477	3,354	0,001	Signifikan
<b>H3b</b>	<b>Kepuasan Pengguna (X4) -&gt; Penggunaan (X3)</b>	<b>0,233</b>	<b>1,696</b>	<b>0,090</b>	<b>Tidak Signifikan</b>
H4a	Penggunaan (X3) -> Dampak Individu (Y)	0,343	3,262	0,001	Signifikan
H4b	Kepuasan Pengguna (X4) - > Dampak Individu (Y)	0,421	4,527	0,000	Signifikan

Keterangan: \* = two tailed test

Hasil uji-t Model-1 (Tabel 10) menunjukkan bahwa dari data yang dikumpulkan ada satu buah pengaruh yang tidak signifikan pada taraf nyata 5% yaitu antara variabel Penggunaan (X3) terhadap Kepuasan Pengguna (X4). Pada hubungan keduanya diperoleh nilai  $t_0$  sebesar 1,692 (lebih kecil dari  $t_\alpha = 1,988$ ) dan p-value sebesar 0,091 (lebih besar dari taraf nyata  $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian  $H_0$  bahwa ada pengaruh antara Penggunaan website terhadap Kepuasan Pengguna tidak signifikan (ditolak

pada taraf nyata 5%. Sedangkan hubungan jalur antar variabel laten yang lain bersifat signifikan dan memiliki pengaruh positif sebagaimana ditunjukkan oleh Original Sample.

Pada Tabel 11 memperlihatkan hasil perhitungan untuk uji-t pada Model-2. Pada tabel tersebut terlihat ada dua buah jalur hubungan yang tidak signifikan. Pengaruh antara konstruk Kualitas Sistem (X1) terhadap Penggunaan (X3) website BPS Provinsi Banten berdasarkan perhitungan data

penelitian bersifat tidak signifikan yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 1,580 (lebih kecil dari t-tabel 1,988). Serta satu lagi adalah pengaruh antara Kepuasan Pengguna (X4) terhadap Penggunaan (X3) juga tidak signifikan pada taraf 5%. Berarti pada kedua jalur tersebut terbukti tidak ada pengaruh yang nyata.

Hal yang cukup menarik adalah dari Tabel 10 dan Tabel 11

menunjukkan tidak cukup bukti untuk menyatakan ada pengaruh antara variabel Penggunaan (X3) terhadap Kepuasan Penggunaan (X4), demikian pula sebaliknya. Berdasarkan kedua tabel tersebut terlihat semua jalur hubungan antar variabel bertanda positif pada nilai Original Sample (O) dimana nilai terbesar O terletak pada hubungan Kualitas Informasi terhadap Penggunaan (0,440) dan Kepuasan Pengguna (0,477).

Tabel 12. Korelasi Antar Variabel Laten

	Kualitas Sistem (X1)	Kualitas Informasi (X2)	Penggunaan (X3)	Kepuasan Pengguna (X4)	Dampak Individu (Y)
Kualitas Sistem (X1)	1,000				
Kualitas Informasi (X2)	0,769	1,000			
Penggunaan (X3)	0,640	0,672	1,000		
Kepuasan Pengguna (X4)	0,692	0,727	0,627	1,000	
Dampak Individu (Y)	0,610	0,703	0,607	0,636	1,000

Tabel 12 memperlihatkan hubungan atau korelasi antar variabel laten yang semuanya bertanda positif dan nilainya lebih besar dari 0,6. Korelasi yang cukup kuat ( $> 0,7$ ) ditemukan pada hubungan antara variabel Kualitas Sistem dan Kualitas

Informasi (0,769), Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna (0,727) dan Kualitas Informasi dan Dampak Individu (0,703).

Berikut adalah ringkasan hasil penghitungan untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah disinggung sebelumnya.

Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis Model EFIS

No.	Hipotesis	Keputusan ( $\alpha=5\%$ two tailed test)
1	H1a: Kualitas Sistem website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Penggunaan.	Tidak Signifikan
2	H1b: Kualitas Sistem website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.	Signifikan

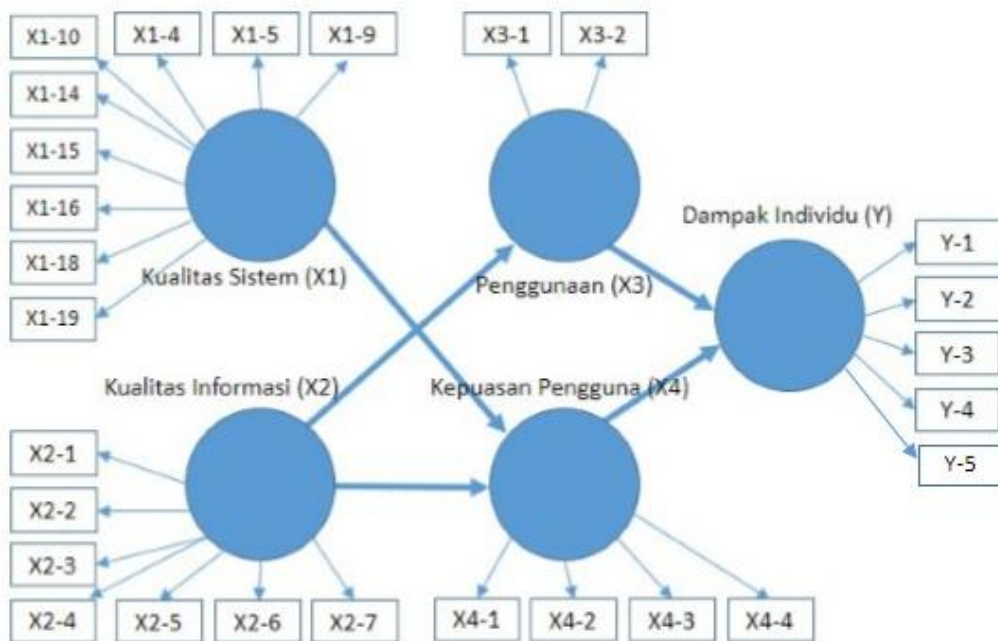
*Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Anang, Dirlanudin, Yearry)*

3	H2a: Kualitas Informasi website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Penggunaan.	Signifikan
4	H2b: Kualitas Informasi website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.	Signifikan
5	H3a: Penggunaan website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.	Tidak Signifikan
6	H3b: Kepuasan Pengguna website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Penggunaan.	Tidak Signifikan
7	H4a: Penggunaan website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Dampak Individu.	Signifikan
8	H4b: Kepuasan Pengguna website BPS Prov. Banten berpengaruh terhadap Dampak Individu.	Signifikan

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa ada 3 hipotesis yang berdasarkan data tidak didukung adanya pengaruh antar variabel laten. Dengan menggunakan hasil pengujian tersebut dapat

disusun model akhir EFIS untuk website BPS Provinsi Banten yang didasarkan pada model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean.

Gambar 6. Model EFIS Final



**5. Analisis dan Pembahasan**

Dalam penyusunan D&M IS Success Model atau model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean pada dasarnya dipicu oleh suatu proses pembuatan informasi dan dampak dari penggunaan sistem informasinya. DeLone dan McLean mendasarkan modelnya pada model proses yang terdiri dari 3 (tiga) komponen proses, yaitu (Jogiyanto, 2007):

1. Pembuatan suatu sistem informasi
2. Penggunaan sistem informasi tersebut
3. Konsekuensi atau dampak dari penggunaan sistem informasi

Ketiga komponen tersebut dapat dipandang sebagai rangkaian input-output-outcome, sehingga secara model ketiga proses tersebut saling terkait. Variabel Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi mewakili komponen pertama. Variabel Penggunaan dan Kepuasan Pengguna mewakili komponen kedua, dan variabel Dampak Individu menggambarkan komponen nomor tiga.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada Model-2 berdasarkan data empiris tidak cukup bukti untuk mendukung hipotesis ada hubungan antara Kualitas Sistem dan Penggunaan. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Supriatna (2012) yang meneliti pengaruh kualitas sistem informasi dan kualitas informasi terhadap persepsi kegunaan dan kepuasan pengguna.

Dalam penelitian tersebut lima hipotesis yang diujikan semuanya signifikan. Supriatna (2012) dalam penelitiannya mengganti dimensi Pengguna pada model D&M dengan Persepsi Kegunaan (*percieved*

*usefulness*). Penggantian ini sesuai dengan usulan model yang diajukan oleh Seddon (1997) yang menspesifikasi ulang model D&M melalui penggantian dimensi Penggunaan dengan Persepsi Kegunaan. Supriatna (2012) dalam penelitiannya menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Kota Cimahi sebagai objek penelitian.

Penelitian Supriatna (2012) memberikan hasil bahwa ada pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Kepuasan Pengguna, Penelitian menyimpulkan bahwa semakin meningkat Persepsi Kegunaan akan menyebabkan meningkatnya Kepuasan Pengguna, sesuai dengan penelitian Seddon (1997). Namun jika dibandingkan dengan penelitian ini maka terjadi perbedaan dengan penelitian Supriatna (2012).

Iivari (2005) berdasarkan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara Kualitas Informasi Persepsian dan Penggunaan aktual serta tidak ada pengaruh antara Penggunaan aktual dengan Dampak Individu. Model dan variabel dalam penelitian Iivari (2005) mirip dengan model dan variabel yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Objek dalam penelitian Iivari (2005) adalah sistem keuangan dan akuntansi yang digunakan di Dewan Kota Oulu Finlandia. Meskipun model yang digunakan mirip namun temuan yang diperoleh Iivari (2005) dengan penelitian tesis ini sangat berbeda.

Menurut Iivari (2005) bahwa sebagai model prediktif maka berdasarkan data empiris model D&M dianggap lengkap dan wajar

dengan hipotesis-hipotesis yang menyertainya.

Namun sebagai model penjelasan kausal (causal-explanatory model) maka model D&M tidak menggambarkan sebagai model yang lengkap. Misalnya, apakah menurut temuan Iivari bahwa Kepuasan Pengguna memprediksi Dampak Individu menyiratkan bahwa Kepuasan Pengguna dalam arti tertentu menjelaskan Dampak Individu, atau bahkan sebaliknya.

Yuliana (2016) menggunakan instrumen kuesioner mirip yang digunakan oleh Iivari (2005) serta model D&M awal (1992) untuk meneliti SIPos di PT. Pos Indonesia Divisi Regional IV Semarang. SIPos adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh seluruh pegawai untuk menjalankan proses bisnis di lingkungan PT. Pos Indonesia, sehingga aplikasi ini bersifat wajib.

Hasil penelitiannya menunjukkan dari 9 pengujian hipotesis hanya 3 buah hipotesis yang signifikan yaitu hubungan antara Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna, Kepuasan Pengguna terhadap Dampak Individu, dan Dampak Individu terhadap Dampak Organisasi. Pegawai sebagai pengguna SIPos menganggap bahwa Kualitas Informasi tidak begitu penting, mereka lebih percaya bahwa Kepuasan Pengguna dipengaruhi oleh Kualitas Sistem.

Meski sama-sama meneliti kesuksesan sistem informasi di sektor publik yang penggunaannya bersifat wajib namun hasil temuan Yuliana (2016) berbeda dengan Iivari (2005). Perbedaan tersebut tentu karena berbeda objek sistem informasi yang diteliti.

Berdasarkan beberapa penelitian kesuksesan sistem informasi yang telah dilakukan ada kesimpulan penting terkait hasil penelitian yang berbeda: pertama, Sistem informasi yang bersifat wajib (mandatory) berbeda dengan yang bersifat suka rela (voluntary). Kedua, perbedaan format aplikasi dari sistem informasi. Dan yang ketiga, perbedaan pengguna (user) dan organisasional. Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap penelitian akan memberikan hasil yang berbeda dibanding penelitian lain.

Dalam pengembangan e-Government, salah satu strategi sebagaimana disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 bahwa pemerintah akan melaksanakan pengembangan e-Government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Setiap perubahan berpotensi meninggalkan ketidakpastian. Oleh karena itu pengembangan e-Government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan pemerintah maka pengembangan e-Government dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan atau tingkatan: Tingkatan-1 persiapan (meliputi: pembuatan situs, penyiapan sarana akses yang mudah digunakan, penyiapan sumber daya manusia (SDM)). Tingkatan-2 pematangan (pembuatan situs informasi publik interaktif, pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga/instansi lain), Tingkatan-3 pemantapan (pembuatan situs sistem informasi pelayanan publik, pembuatan

interoperabilitas aplikasi maupun data dengan instan lainnya). Tingkatan-4 pemanfaatan (pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C secara terintegrasi).

Jika dilihat dari fitur yang dimiliki oleh website BPS Provinsi Banten maka bisa dikatakan bahwa website BPS Provinsi Banten masih dalam Tingkatan-1 persiapan.

## 6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa untuk meningkatkan pengguna dan kepuasan pengguna website BPS Provinsi Banten maka yang lebih diutamakan adalah peningkatan kualitas informasi dibanding kualitas sistem (Gambar 6). Pada gambar tersebut terlihat bahwa Kualitas Sistem hanya berpengaruh positif pada variabel Pengguna, sedangkan Kualitas Informasi berpengaruh positif terhadap Pengguna dan Kepuasan Pengguna.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UU Statistik Nomor 16 Tahun 1999 bahwa upaya untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun sistem informasi statistik dan meningkatkan penyebaran informasi statistik.

Berdasarkan perhitungan dengan PLS di atas bisa disimpulkan bahwa website BPS Provinsi Banten cukup efektif dengan melihat nilai koefisien determinan (R-square) sebesar 0,476 pada variabel endogen Dampak Individu dan nilai koefisien jalur (original sample O) yang bertanda positif. Nilai R-square sebesar

0,476 menunjukkan bahwa variasi Dampak Individu yang dapat dijelaskan oleh variabel Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi melalui variabel Penggunaan dan Kepuasan Pengguna sebesar 47,6% sedangkan sisanya sebesar 52,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sedangkan tanda positif pada original sample O atau koefisien jalur menunjukkan bahwa kenaikan nilai suatu variabel akan diikuti oleh kenaikan pada variabel lain yang berhubungan.

Dalam penelitian berikutnya terkait sistem informasi disarankan untuk menggabungkan atau melakukan kombinasi beberapa metode (Jogiyanto, 2008). Secara garis besar dalam penelitian sistem informasi ada beberapa pendekatan, yaitu: faktor manusia, faktor teknologi dan faktor organisasi (Pamugar, Winarno & Najib, 2014). Untuk penelitian yang lebih mendalam terkait sistem informasi atau e-government ketiga faktor tersebut berikut metodenya perlu dipertimbangkan.

## Daftar Pustaka

- Connolly, D. (2000). A little history of the world wide web. Diakses dari <http://www.w3.org/History.html>.
- DeLone, W. H. & McLean, E. R. (1992). Information system success: the quest for the dependent variable. *Information Systems Research*. Vol. 3 (1). The Institute of Management Sciences, 60-95. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/a041/45f1ca06c61f5985ab22a2346b788f343392.pdf>.
- DeLone, W. H. & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year



- update. *Journal of Management Information Systems*. Vol. 19 (4). M.E. Sharpe, Inc, 9-30. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/220591866\\_The\\_DeLone\\_and\\_McLean\\_Model\\_of\\_Information\\_Systems\\_Success\\_A\\_Ten-Year\\_Update](https://www.researchgate.net/publication/220591866_The_DeLone_and_McLean_Model_of_Information_Systems_Success_A_Ten-Year_Update).
- Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. (2003). Enterprise systems success: a measurement model. *International Conference on Information Systems (ICIS) December 2003 Proceeding, Association for Information Systems*, 576-591. Diakses dari <https://eprints.qut.edu.au/4743/1/4743.pdf>.
- Gudono. (2016). Analisis data multivariat (edisi 4). Yogyakarta: BPFE.
- Haque, S., Pathrannarakul, P. & Phinaitrup, B. (2012). Modernizing public sector organization: enhancing coordination and communication by the application of e-government technology. *International Journal of Independent Research and Studies* Vol. 1, No. 4, Oktober 2012, 135-141. Diakses dari [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2163955](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2163955).
- Iivari, J. (2005). An empirical test of the delone-mclean model of information system success. *The Data Base for Advances in Information Systems - Spring 2005 (Vol. 36, No. 2)*, 8-27. Diakses dari <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1066152>.
- Irawan, C. (2012). Evaluasi kualitas website pemerintah daerah dengan menggunakan webqual (studi kasus pada Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2012, 488-502. Diakses dari <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>.
- Jaya, I. G. N. M. & Sumertajaya, I. M. (2008). Pemodelan persamaan struktural dengan partial least square. *Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika* 2008. Diakses dari [http://eprints.uny.ac.id/6856/1/M-13%20Statistika%28I%20GEDE\\_UNPAD%29.pdf](http://eprints.uny.ac.id/6856/1/M-13%20Statistika%28I%20GEDE_UNPAD%29.pdf).
- Jogiyanto, H. (2007). Model kesuksesan sistem teknologi informasi (edisi 1). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Jogiyanto, H. (2008). Metodologi penelitian sistem informasi (edisi 1). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019. Diakses dari [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/556/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+21+tahun+2016+tanggal+7+desember+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/556/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+21+tahun+2016+tanggal+7+desember+2016).
- Latham, B. (2007). Sampling: what it is? *Quantitative Research Methods*, ENGL 5377. Diakses dari [http://webpages.acs.ttu.edu/rlatham/Coursework/5377\(Quant\)/Sampling\\_Methodology\\_Paper.pdf](http://webpages.acs.ttu.edu/rlatham/Coursework/5377(Quant)/Sampling_Methodology_Paper.pdf).
- Pamugar, H., Winarno, W. W. & Najib, W. (2014). Model evaluasi kesuksesan dan penerimaan sistem informasi e-learning pada lembaga diklat pemerintah. *Scientific Journal of Informatics* Vol. 1, No. 1, Mei 2014, 13-27. Diakses dari [https://journal.unnes.ac.id/artikel\\_nju/sji/3638](https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/sji/3638).
- Purwanto, A. (2007). Rancangan dan implementasi model pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aplikasi e-government di pemerintah daerah: studi kasus Kabupaten Sragen. (tesis magister). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Diakses dari [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=36802](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=36802).
- Sarwono, J. & Narimawati, U. (2015). Membuat skripsi, tesis dan disertasi dengan Partial Least Square SEM (PLS SEM). Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Seddon, P. B. (1997). A respecification and extension of the DeLone and McLean Model of IS success. *Information System Research* Vol. 8, No. 3, September 1997. Diakses dari <http://eli.johogo.com/Class/p22.pdf>.
- Sekretariat Negara. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Diakses dari [http://jdih.bps.go.id/files/produk\\_hukum/uu/P02199716.pdf](http://jdih.bps.go.id/files/produk_hukum/uu/P02199716.pdf).
- Sekretariat Negara. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Diakses dari <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/1468-2/>.
- Sekretariat Negara. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diakses dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-25-tahun-2009.html>.
- Supriatna, I. (2012). Pengaruh kualitas sistem informasi dan kualitas informasi terhadap persepsi kegunaan dan kepuasan pengguna. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* Vol. 4 No. 1, Mei 2012, 45-60.
- Yuliana, K. (2016). Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean untuk evaluasi sistem informasi pos pada PT. Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional VI Semarang. *INFOKAM* No. II Th. XII/SEPTEMBER/2016, 13-23.

## **POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI KEDATANGAN TENAGA KERJA ASING ASAL CHINA DI KECAMATAN PULOAMPEL KABUPATEN SERANG**

Shanty Kartika Dewi dan Anis Fuad  
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta  
Jl. Raya Jakarta KM. 4, Pakupatan, Serang, Banten 42122  
Email: kartika@untirta.ac.id

### *Abstract*

*The growing presence of foreign workers to Indonesia has the potential to cause problems. In 2016, the arrest of 70 illegal foreigners from China who worked on the construction project of Cement Factory of PT. Conch Cement Indonesia in PuloAmpel, Serang Regency. The presence of several projects The arrival of foreign workers, especially from China in Serang Regency, has the potential to create a variety of socio-economic problems, such as: reduced employment of local workers, conflicts between foreign workers and local communities, cultural clashes and social problems. In addition, the presence of foreign workers is also suspected through procedures that do not comply with immigration regulations and violate labor regulations. This study is a preliminary step in conducting more in-depth research with a qualitative approach.*

Keywords: Foreign Worker, Immigration, Social Conflict, Social and Economic Impacts

### **1. Pendahuluan**

Kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini menjadi perbincangan publik. Kebijakan menerima kedatangan tenaga kerja asing sesungguhnya bukan kebijakan baru di era pemerintahan Joko Widodo. Jauh sebelumnya, kebijakan menerima tenaga kerja asing ke Indonesia sudah lama dilakukan. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai dampak dari terbukanya negara ini terhadap investasi dari negara lain. Konsekuensinya, pemerintah harus terbuka menerima tenaga asing, alasannya, selain alih keterampilan juga ada alih teknologi.

Kedatangan tenaga asing merupakan salah satu konsekuensi dari diaplikasikannya perdagangan bebas yang di prakarsai oleh WTO (World Trade Organization) sejak tahun 1995. Globalisasi berdampak pada perputaran investasi keseluruhan dunia dan berkonsekuensi pada kebutuhan tenaga kerja terampil yang berasal dari negaranya menuju negara tujuan

investasi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan kasar dari negara miskin dan berkembang.

Kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia juga merupakan konsekuensi dari diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai berlaku akhir tahun 2015. Terkait regulasi sesungguhnya sejak tahun 1958, Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Ketentuan yang mengatur tenaga kerja asing setelah kemerdekaan terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. Munculnya Undang-undang tersebut, karena pada saat itu berbagai bidang-bidang pekerjaan tertentu ditempati oleh tenaga kerja asing, dimana tenaga kerja Indonesia belum memungkinkan menempati bidang-bidang pekerjaan tertentu,

baik di bidang-bidang teknis maupun bidang-bidang usaha dalam suatu perusahaan. Disatu sisi UU tersebut berusaha melindungi kepentingan tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi dalam segala lapangan pekerjaan, pada sisi lain terbatasnya sumber daya manusia, maka masih dimungkinkan atau dibolehkannya tenaga kerja asing menempati posisi-posisi tertentu dan berkerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan berkerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi.

Kemudian di tahun 1969 Muncul Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Kemudian ditahun 1997-1998 terbit Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan; serta di tahun 2000 terbit Undang-undang Nomor 28 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang. Terakhir adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di Era Joko Widodo, penggunaan tenaga kerja asing diatur oleh perpres nomor 20 tahun 2018.

Terkait jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, berdasarkan data Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, per Februari 2016, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk dan berkerja di Indonesia berdasarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) per akhir Februari 2016 adalah 5.339 orang. Data TKA sebanyak 5.339 orang, terdiri dari periode bulan Januari sebanyak 2.067 orang untuk TKA yang berkerja lebih dari 6 bulan, dan 516 orang untuk TKA yang berkerja di bawah 6 bulan. Sedangkan bulan Februari sebanyak 2.303 orang (lebih dari 6 bulan) dan 453 orang (di bawah 6 bulan).

Selepas bulan Februari 2016, berdasarkan data Kemenakertrans, Tenaga kerja Asing di Indonesia bertambah sebanyak 74.183. Rinciannya, sebanyak 21.271 tenaga kerja asing asal China, 12.490 tenaga kerja asing asal Jepang, 8.424 tenaga kerja asing asal Korea Selatan, dan 5.059 tenaga kerja asing asal India. Kemudian 4.138 tenaga kerja asing asal Malaysia, 2.812 tenaga kerja asing asal Amerika Serikat, 2.394 tenaga kerja asing asal Thailand. Lalu sebanyak 2.483 tenaga kerja asing asal Australia, 3.428 tenaga kerja asing asal Filipina, 2.252 tenaga kerja asing asal Inggris, 1.748 tenaga kerja asing asal Singapura, dan 7.684 tenaga kerja asing dari negara-negara lainnya. Berdasarkan data tersebut, tenaga kerja asing paling banyaka berasal dari China yang tersebar di sector Konstruksi, pembanguna smelter dan PLTU (ekonomi.kompas.com, 17 Juli 2017).

Tahun 2017, Berdasarkan data Kemenakertrans, Tenaga Kerja Asing di Indonesia bertambah 85.974 orang yang tersebar di sektor usaha jasa sebanyak 52.633

orang, sektor industri sebanyak 30.625 orang, dan sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.716 orang. Sedangkan dari sisi jabatannya, sebagai konsultan sebanyak 12.779 orang, Direksi sebanyak 15.596 orang, komisaris sebanyak 2.173 orang, manager sebanyak 20.099 orang, profesional sebanyak 23.869 orang, supervisor sebanyak 2.314 orang, dan teknisi sebanyak 9.144 orang.

Dari sisi asal negaranya, paling banyak berasal dari China yakni 24.804 orang, lalu Jepang dengan 13.540 orang. Kemudian dari Amerika Serikat (AS) sebanyak 2.526 orang, Australia sebanyak 2.603 orang, India sebanyak 6.237 orang, Inggris sebanyak 2.016, Korea Selatan sebanyak 9.521 orang. Dari Malaysia sebanyak 4.603 orang, Filipina sebanyak 3.174 orang, Singapura sebanyak 1.915 orang, dan lainnya sebanyak 15.035 orang (finance.detik.com)

## **2. Masalah Kebijakan atau masalah Sosial Ekonomi?**

Datangnya tenaga kerja asing di Indonesia tentunya berdampak positif maupun negatif pada kehidupan bernegara maupun masyarakat dari segala aspek, dari masalah kebijakan juga masalah sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Berdasarkan kajian yang dilakukan P2K Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terjadi lesatan investasi China ke Indonesia. Pada 2016, China telah duduk di posisi ke-3 sebagai investor terbesar dengan nilai investasi USD 2,665 juta atau 9 persen dari total investasi di Indonesia. Naik dari 2015 sebesar USD 628 juta atau 2 persen dari total investasi asing di Indonesia.

Nilai investasi China kalah dari Singapura yang sebesar USD 9,179 juta (32 persen) dan Jepang sebesar USD 5,401 juta (19 persen). Peningkatan investasi oleh China tersebut berdampak dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja asal China yang migrasi ke Indonesia. Disinyalir pengiriman Tenaga Kerja asal China ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, merupakan dampak kebijakan Pemerintah China untuk mengatasi membengkaknya jumlah pekerja di China. China sebagai negara over populasi harus membuat kebijakan investasi ke negara lain yang mendukung penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Salah satu negara sasaran Investasi China yakni Indonesia. Bagi China, Indonesia salah satu negara yang memiliki kemudahan untuk berinvestasi dan berbisnis. China menjadi negara yang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, China menduduki posisi ke 7 dari 10 besar negara yang berinvestasi di Indonesia periode 2012-2017 yakni dengan jumlah proyek 5.365 dengan realisasi investasi US\$ 7,8 miliar.

Salah satu provinsi yang menjadi sasaran Investasi China di Indonesia adalah Banten. Banten merupakan salah satu wilayah yang strategis untuk berinvestasi. Banten dekat dengan Jakarta, fasilitas infrastruktur dalam kegiatan ekonomi sangat terjamin. Terdapat Bandara Internasional, juga Selat sunda yang strategis. Terdapat fasilitas pelabuhan-pelabuhan yang representatif dan infrastruktur Jalan yang sangat memadai.

Di Banten terdapat 12 proyek nasional yang sedang dan akan dikerjakan di antaranya ruas jalan tol Serang-Panimbang, proyek pembangunan bandar udara baru panimpang, proyek pembangunan pipa gas/terminal elpiji, proyek pembangunan infrastruktur energi asal sampah, proyek Bendungan Karian, proyek pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan KEK Tanjung Lesung, Modern Cikande, Wilmar, KIEC, proyek pembangunan pariwisata ([www.titiknol.co.id](http://www.titiknol.co.id)). Adapun nilai investasi China di Banten per triwulan ketiga 2016 sebesar Rp. 43 triliun.

Salah satu daerah di Provinsi Banten yang paling banyak menyerap tenaga kerja Asing yakni Kabupaten Serang. Di Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, ada beberapa proyek pembangunan dan pabrik dengan investor dari penanam modal Asing. Paling besar yakni Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 660 MW, dengan bendera PT. Lestari Banten Energi milik Genting Energy Limited milik WN Malaysia keturunan China. Dalam proses pembangunannya banyak menyerap tenaga kerja asing dari China yang dihimpun oleh Harbin Power Engineering asal China dan CSCEC (China Strait Construction Engineering Corp).

Selain Pembangkit Listrik, China juga berinvestasi Pabrik Semen di kawasan industri Pulo Ampel. Tepatnya di desa sumuranja, Pulo Ampel di bangun pabrik semen PT. Conch Cement Indonesia milik investor dari China, Anhui Conch Hldings yang dimiliki oleh Anhui Provincial People's Government,

Investment Group Holdings Co., Ltd., China Conch Venture Holdings dan Conch Venture Investment. Tenaga kerjanya juga sebagian besar berasal dari China.

### **3. Profil ketenagakerjaan di Kabupaten Serang tahun 2017**

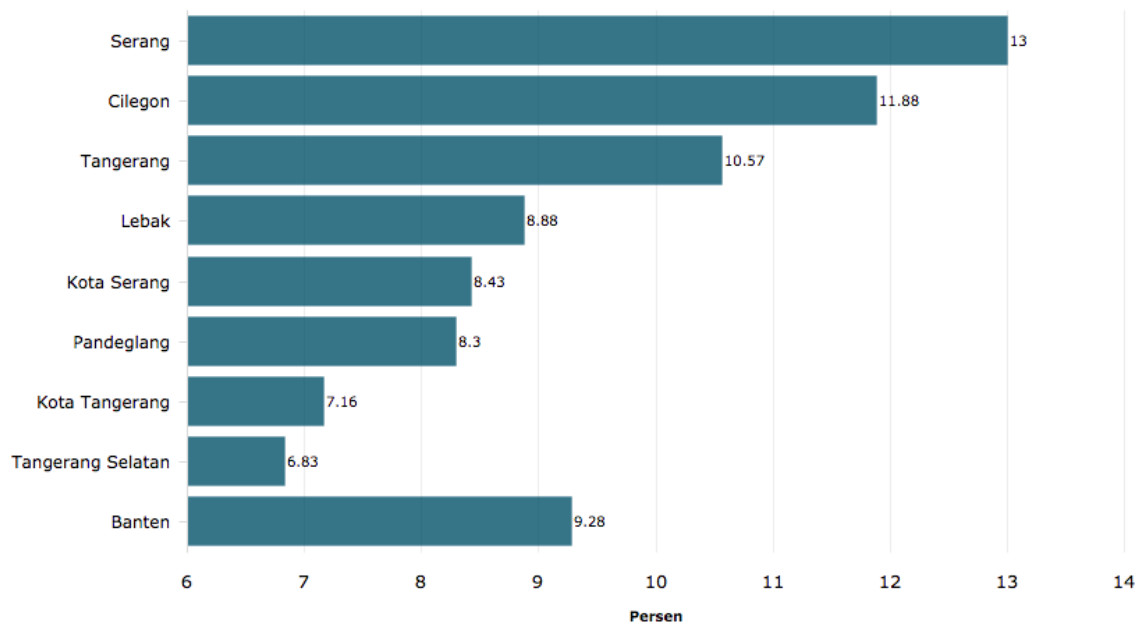
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten pada Agustus 2017 mencapai 5,6 juta orang, sementara penduduk yang bekerja hanya 5,08 juta orang. Dapat ditafsirkan, di Banten terdapat pengangguran sebanyak 520 ribu orang atau 9,28 persen dari total angkatan kerja. Angka tersebut jauh di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 5,5 persen. Jumlah pengangguran Banten tersebut juga naik dari 499 ribu orang (8,92 persen) dari total angkatan kerja pada Agustus 2016 (BPS, 2017).

Berdasarkan catatan BPS Banten, angka pengangguran terbesar di Banten dicatat oleh Kabupaten Serang dengan TPT mencapai 13 persen (82 ribu orang). Di urutan kedua Cilegon dengan TPT sebesar 11,88 persen (22 ribu orang), dan di posisi ketiga adalah Tangerang dengan TPT mencapai 10,57 persen (175 ribu orang). Sementara TPT di Tangerang Selatan merupakan yang terendah, yakni 6,83 persen (48 ribu orang).

Dari tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling banyak yang berstatus sebagai pencari kerja (14,25 persen) sementara dari lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) sebesar 12,72 persen. Demikian pula TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Agustus 2017 juga lulusan SMK, yakni sebesar

14,25 persen, diikuti SMA sebesar 12,72 persen.

Gambar1. Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Banten



Sumber: BPS, 2017

Di Kabupaten Serang, Berdasarkan data BPS Per Agustus 2017, Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebesar 367,9 ribu orang, bertambah sekitar 17 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015. Pada periode yang sama terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 14,80 persen menjadi 13,00 persen.

TPT lulusan pendidikan tertinggi SMA Kejuruan (SMK) menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain yaitu 26,79 persen pada Agustus 2017. Sedangkan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Serang adalah sektor industri dan sektor pertanian, masing-masing sebesar 29,17 persen dan 22,70 persen. Selain itu, berdasarkan status pekerjaan, sebagian

besar penduduk bekerja di Banten berstatus buruh/ karyawan (263,6 ribu orang). Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal.

Lebih lanjut BPS Kabupaten Serang menjelaskan, pada periode Agustus 2015 - Agustus 2017 jumlah angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 620,52 ribu orang pada Agustus 2015 menjadi 628,10 orang pada Agustus 2017. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 17,79 ribu pada periode tersebut. Jumlah pengangguran justru mengalami penurunan dari 91,84 ribu orang menjadi 81,63 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 60,39 persen

menjadi 59,95 persen. Menurunnya TPAK ini merupakan indikasi adanya penurunan suplai tenaga kerja.

Secara relatif angka pengangguran di Kabupaten Serang menunjukkan penurunan dari 14,82 persen pada Agustus 2015 menjadi 13,00 persen pada bulan Agustus 2017. Namun, angka pengangguran Kabupaten Serang selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran Banten dan Kabupaten/Kota lain di Banten. Pada Agustus 2017, angka pengangguran Kabupaten Serang masih menempati peringkat tertinggi di Banten.

Di Kabupaten Serang banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Kabupaten Serang khususnya pada sektor Industri. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Serang. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Kabupaten Serang. Dilihat berdasar tren sektoral, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di tiga lapangan pekerjaan yaitu di Industri (159,41 ribu orang), Pertanian (124,03 ribu orang) serta Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (92,67 ribu orang).

### **Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Serang**

Penyebaran tenaga kerja asing (TKA) di wilayah Provinsi Banten terdistribusi ke enam kabupaten/kota, yang selama ini notabene menjadi daerah industri. Keenam kabupaten/kota yang menjadi konsentrasi penyebaran Tenaga Kerja Asing yakni di Kota

Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RTKA) di Banten, TKA yang diestimasi yang akan masuk ke provinsi Banten berjumlah 25.000 hingga 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi menyatakan jumlah TKA di Banten menurun setiap tahunnya. Pada 2015, tercatat ada sekitar 10.081 TKA atau menurun menjadi 9.000-an pada 2016. Tahun 2008 turun menjadi 8.000-an. Namun jumlah yang tercatat merupakan TKA yang punya dokumen yang sah dan legal (kabar-banten.com, 3 Mei 2018).

Di kabupaten Serang, tahun 2016, TKA yang tercatat di Kantor Imigrasi Klas I Banten terdapat sebanyak 2.879 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.353 orang dari jumlah tahun 2015 yang mencapai 1.526 orang. 2.879 jumlah TKA di tahun 2016 ini belum termasuk TKA ilegal yang datang menggunakan Visa izin wisata, akan tetapi melakukan aktifitas bekerja di beberapa perusahaan di Serang, Banten.

Kemudian di tahun 2017 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsdukcapil) Kabupaten Serang mencatat, selama 2017 sebanyak 2.100 tenaga kerja asing (TKA) masuk ke wilayah Kabupaten Serang. Secara dominan TKA tersebut berasal dari negara Korea, Cina, dan India. Data tersebut didasarkan dari laporan kartu izin tinggal sementara (KITAS) yang masuk ke



Dinsdukcapil Kabupaten Serang (kabar-banten.com, 27 Maret 2018).

Berbeda dengan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang, tercatat sebanyak 1.644 tenaga kerja asing (TKA) bekerja di perusahaan wilayah Kabupaten Serang pada 2017 yang didominasi oleh TKA asal China. Banyaknya TKA disinyalir akibat minimnya tenaga kerja lokal yang sesuai kebutuhan perusahaan. Namun Data TKA bisa jadi tidak sinkron. Karena Disnakertrans hanya mencatat yang melapor. Disnakertrans Kabupaten Serang menjamin, TKA di Kabupaten Serang rata-rata bekerja di bagian tenaga ahli. Selama TKA menjalankan pekerjaannya, seharusnya wajib didampingi tenaga lokal agar bisa transfer ilmu. Namun, rata-rata tidak didampingi. (radarbanten.co.id, 26 Januari 2018)

Tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Serang mencatat sebanyak 1.471 tenaga kerja asing (TKA) bekerja di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Selama tahun 2018 ini, sebanyak enam orang TKA asal China terpaksa dideportasi ke negaranya karena tidak memiliki dokumen resmi. Dari total TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Serang, kebanyakan berasal dari negara China. Mereka bekerja di sektor industri dan infrastruktur. Paling banyak bekerja di kawasan modern Cikande (daerah.sindonews.com, 27 April 2018).

### **Potensi Masalah Sosial dan Ekonomi Keberadaan Tenaga Kerja Asing**

Keberadaan tenaga kerja asing di Banten khususnya di kabupaten Serang

memiliki potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat di sekitar keberadaan TKA tersebut. Permasalahan sosial ekonomi telah muncul di Pulo Ampel, Kabupaten Serang. Tahun 2016, terjadi penangkapan 70 WNA ilegal asal Tiongkok yang bekerja pada proyek pembangunan Pabrik Semen PT. Conch Cement Indonesia dan telah menjadi pembicaraan khusus di masyarakat Banten. Komposisi pekerja proyek tersebut adalah 30 persen dari lokal dan 70 persen asing. Upah yang diterima TKA pun lebih besar dibanding buruh lokal. Tenaga kerja asing itu dibayar 15 juta per bulan, sedangkan tenaga lokal hanya di bayar 2 juta perbulan dengan rata-rata per hari Rp 80 ribu, dan tenaga kerja asing rata-rata Rp 500 ribu per hari. Menutup Kasubdit I Indag Ditkrimus Polda Banten AKBP Dani Arianto, selain buruh kasar di lapangan, ada juga warga negara Cina yang diperkerjakan di dalam kantor dengan bayaran Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per bulan.

Selain itu, secara viral, beredar video perkelahian antar tenaga kerja asing asal tiongkok dengan tenaga kerja lokal disinyalir terjadi proyek PLTU Salira, PT. Energi Banten Lestari, Pulo Ampel. Dalam proyek tersebut juga terjadi perbedaan mencolok pendapatan antara TKA dan TK lokal. Berdasarkan observasi awal peneliti dan pengakuan masyarakat Desa Salira di tahun 2016, buruh-buruh lokal tersebar dan tinggal di sekitar pemukiman masyarakat.

Maraknya protes dari elemen tenaga kerja lokal dan masyarakat terkait kedatangan tenaga kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Serang dapat ditafsirkan sebagai indikator

adanya permasalahan kecemburuan sosial dari masyarakat yang merasa tersisihkan dan buruh local yang merasa hak-haknya akan terampas jika Tenaga Kerja Asing semakin banyak datang ke provinsi Banten. Mereka protes karena adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing banyak yang tidak didampingi tenaga kerja lokal.

Pekerjaan yang sebenarnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal nyatanya diisi tenaga kerja asing. Di Sinyalir, proyek infrastruktur yang berasal dari investasi China membutuhkan tenaga kerja masif. Namun, investor China juga mengambil pekerja dari negara asalnya, termasuk tenaga kerja kasarnya/ unskill worker. Kekhawatiran lain terkait tak adanya kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja asing. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konflik karena berkaitan dengan budaya dari asal masing-masing pekerja.

Salah satu bentuk protes elemen tenaga kerja lokal di kabupaten Serang dilakukan oleh DPC SPN Kabupaten Serang, menentang maraknya tenaga kerja asing illegal. DPC SPN Serang memandang bahwa masuknya Tenaga Kerja Asing disemua lapisan baik secara Legal apalagi secara Illegal akan semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itulah DPC SPN Kab. Serang melakukan Rapat Kordinasi dengan seluruh PSP SPN se- Kabupaten Serang. Rapat Kordinasi tersebut telah menghasilkan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran SPN se-Kabupaten Serang yang berkaitan mengantisipasi semakin maraknya

Tenaga Kerja Asing Ilegal di Kab. Serang diantaranya:

1. Masing-masing PSP SPN Kab. Serang akan melakukan pendataan tentang jumlah Tenaga Kerja Asing yang ada di setiap perusahaan;
2. Mengklarifikasi jumlah Tenaga Kerja Asing, dilihat berdasarkan legalitas formal berkenaan dengan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA);
3. Sehubungan dengan banyaknya penyalahgunaan tenaga kerja asing masuk Indonesia, maka DPC SPN Kabupaten Serang mengutuk keras cara-cara tersebut;
4. DPC SPN Kab. Serang akan memberikan laporan ke Disnakertrans Kab. Serang dan Dirjen Imigrasi untuk dilakukan monitoring;
5. Meminta DPD dan DPP SPN ataupun aliansi SP/SB se Kab. Serang untuk membuat pernyataan sikap bersama/pernyataan organisasi menolak semakin masuknya tenaga kerja asing illegal ke Indonesia.

Terkait keberadaan PT Conch Cement Indonesia yang berlokasi di Puloampel, Kabupaten Serang dinilai banyak melanggar peraturan pemerintah. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, setidaknya ada 39 pelanggaran yang harus ditindaklanjuti manajemen perusahaan penghasil semen ini. (bantenraya.com, 27 April 2018)

Selain teguran terjadinya 39 pelanggaran di PT. Conch Cement Indonesia (CCI), Karang Taruna Desa Sumuranja, menyatakan bahwa PT CCI baru berdiri sekitar satu tahun. Ironisnya keberadaan perusahaan tersebut kerap menimbulkan keresahan masyarakat. Perusahaan ini etikanya tidak baik, malam hari karyawannya suka main petasan dan minum-minuman keras. Masyarakat sekitar merasa terganggu.

Karang Taruna desa Sumuranja, Pulo Ampel meminta perusahaan untuk berkomitmen dengan menandatangani enam tuntutan yang dilayangkan. Antara lain, dalam melakukan rekrutmen karyawan, sebanyak 80 persennya wajib dari tenaga lokal dan 20 persen dari tenaga luar daerah. Kedua, sistem kerja dan pengupahan harus sesuai dengan standar nasional minimal UMK, bukan mengacu kepada aturan China. Ketiga, Warga Negara Asing (WNA) yang dipekerjakan harus legal. Keempat, pihak perusahaan harus ada kepedulian kepada masyarakat berupa bantuan CSR. Kelima, pihak perusahaan harus menghormati adat istiadat setempat dengan membangun musholla dan memasang bendera merah putih di areal perusahaan. Keenam, mandor yang bekerja di perusahaan tersebut jangan sewenang-wenang melakukan intimidasi kepada karyawan dengan bertindak kasar. (satelitnews.co.id, 8 September 2015)

### **Penutup**

Kedatangan tenaga kerja asing, terutama asal China di Kabupaten Serang berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, antara lain: berkurangnya

penyerapan tenaga kerja lokal, konflik antara tenaga kerja asing dengan masyarakat lokal, benturan kebudayaan, dan kerawanan sosial seperti maraknya hiburan malam dan minuman keras. Selain itu kehadiran tenaga kerja asing juga diduga melalui prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian dan melanggar aturan ketenagakerjaan.

Kajian ini merupakan langkah permulaan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan secara kualitatif. Penelitian ini nantinya untuk menggali fenomena kedatangan tenaga kerja asing serta dampaknya secara positif dan negatif, khususnya kedatangan tenaga kerja asing asal China di kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang. Dampaknya dapat dilihat dari dimensi sosial dan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sekitarnya. Ada banyak masalah yang ditemui terkait fenomena ini, menarik untuk diteliti dan didalami sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dan masukan bagi pembuat kebijakan dan stakeholder di Indonesia secara umum dan Banten secara khusus.

### **Daftar Pustaka**

Badaruddin, Muhammad dan Suciliana Octavia, 2017, Pengaruh Investasi China Terhadap Penanganan Ketenagakerjaan Asing Di Indonesia, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 2, No 4 (2017) <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/339>

*Potensi Dampak Sosial dan Ekonomi Kedatangan Tenaga Kerja Asing di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang (Shanty dan Anis)*

- Fitratunnisa , 2016, Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Masyarakat Kota Dumai, Jom Fisip Volume 4 No.1 Februari 2016  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/13549/13113>
- Hastuti, Hesti, dkk., 2005, Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2005  
<https://www.bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.pdf>
- Juwitasari, Nina, Sonhaji dan Solechan, 2016, Implikasi Yuridis Keberadaan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Kerja di Indonesia, Diponegoro Law Review, Vol. 5 no. 2, 2016  
<https://media.neliti.com/media/publications/19144-ID-implikasi-yuridis-keberadaan-tenaga-kerja-asing-sebagai-tenaga-kerja-di-indonesi.pdf>
- Suhandi, 2016, Pengaturan Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia, PERSPEKTIF Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei. [jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/193](http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/193)
- <http://bantenraya.com/berita/2018/04/27/690/p-t-conch-cement-indonesia-banyak-pelanggaran#ixzz5KAJcyx3T>
- <http://cahaya.co/kanal/read/45/4879/keberadaan-tka-cina-di-pulo-ampel-resahkan-warga.html>
- <http://kabar5.com/tenaga-kerja-asing-kabupaten-serang-meningkat/>
- <http://satelitnews.co.id/2015/09/08/resahkan-masyarakat-warga-demo-pt-cci/>
- [http://www.listrikindonesia.com/maraknya\\_tenaga\\_kerja\\_asing\\_ilegal\\_tenaga\\_lokal\\_terancam\\_menganggur\\_1741.htm](http://www.listrikindonesia.com/maraknya_tenaga_kerja_asing_ilegal_tenaga_lokal_terancam_menganggur_1741.htm)
- <https://daerah.sindonews.com/read/1301157/174/1471-tka-bekerja-di-kabupaten-serang-kebanyakan-dari-china-1524763026>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/09/pengangguran-kabupaten-serang-tertinggi-di-banten>
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/17/171733726/jumlah-tenaga-kerja-asing-dari-china-di-indonesia-tertinggi-sejak>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3161872/mea-berlaku-5300-tenaga-kerja-asing-bekerja-di-indonesia>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3161872/mea-berlaku-5300-tenaga-kerja-asing-bekerja-di-indonesia>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3988252/hingga-akhir-2017-jumlah-tka-di-ri-ada-85974-orang>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/28/11193181/indef-dengan-kebijakan-bebas-visa-indonesia-kecolongan-soal-tenaga-kerja>

<https://news.okezone.com/read/2015/09/10/340/1211911/25-200-tenaga-kerja-asing-segera-serbu-banten>

<https://serangkab.bps.go.id>

<https://tirto.id/benarkah-tenaga-kerja-asing-mudah-masuk-indonesia-cHrL>

<https://www.biem.co/read/2018/03/29/16203/dpmpst-targetkan-retribusi-tka-10-miliar/>

<https://www.kabar-banten.com/6-kab-kota-jadi-incaran-tenaga-kerja-asing/>

<https://www.kabar-banten.com/selama-2017-2-100-tka-masuk-kabupaten-serang/>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2307770/phk-dan-serbuan-pekerja-asing-ancam-banten>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3469944/headline-tenaga-kerja-asing-tuntutan-investasi-atau-ancaman-bagi-pekerja-lokal>

<https://www.radarbanten.co.id/1-644-tka-tercatat-bekerja-di-kabupaten-serang/>

<https://www.radarbanten.co.id/1-644-tka-tercatat-bekerja-di-kabupaten-serang/>

<https://www.radarbanten.co.id/inilah-wajah-tenaga-kerja-asing-yang-ditangkap-polda-banten/>

<https://www.radarbanten.co.id/pt-conch-cement-diduga-banyak-langgar-hukum/>

<https://www.radarbanten.co.id/tahun-ini-sudah-1-000-buruh-di-kabupaten-serang-di-phk/>

<https://www.radarbanten.co.id/tka-ilegal-asal-tiongkok-di-pabrik-semen-pulo-ampel-bergaji-fantastis/>

# PANDUAN PENULISAN

## Scientium

ISSN: 2355-5246

### Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah Provinsi Banten

Scientium menerima naskah hasil penelitian dan naskah hasil penelaahan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, sosial, dan humaniora. Hasil penelitian dan penelaahan dimaksud diutamakan yang dilakukan di wilayah Provinsi Banten. Dalam setiap penerbitan Scientium memprioritaskan naskah hasil penelitian, sebanyak minimal 60% dari jumlah keseluruhan artikel yang dimuat.

Ketentuan yang harus diikuti adalah:

1. Naskah yang dikirimkan hendaknya belum pernah dimuat dalam media publikasi apapun. Jika merupakan perbaikan dari presentasi dalam konferensi ilmiah, maka hal tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk footnote.

2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris menggunakan Microsoft word, font times new roman 11, 1.5 spasi dengan panjang 10-15 halaman A4, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Naskah Hasil Penelitian

i. **Judul.** Maksimal 14 kata dalam Bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris. Lugas, menarik dan mencerminkan isi naskah, times new roman 12.

ii. **Nama Penulis.** Ditulis tanpa gelar, dilengkapi dengan nama dan alamat lembaga, kode pos serta email untuk korespondensi.

iii. **Abstrak.** Tulisan ringkas, maksimal 200 kata, menggambarkan keseluruhan isi

naskah, meliputi: masalah, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (Jika naskah berbahasa Inggris) atau Bahasa Inggris (Jika naskah berbahasa Indonesia). Abstrak ditulis dalam font times new roman 11 spasi dan italic.

iv. **Kata Kunci.** Konsep-konsep kunci yang digunakan dalam naskah, maksimal 5 kata kunci secara alfabetis.

v. **Pendahuluan.** Memuat latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, teori yang digunakan dan tinjauan literature berupa penelitian-penelitian terdahulu yang diacu dalam penelitian ini.

vi. **Metode.** Menjelaskan metode penelitian yang dilakukan.

vii. **Hasil.** Data-data yang diperoleh dalam penelitian baik berupa narasi, gambar, tabel, ataupun grafik. Gambar, tabel dan grafik harus disertai keterangan judul dan sumber..

viii. **Pembahasan.** Merupakan interpretasi data-data hasil penelitian dengan menggunakan teori yang sesuai serta menjawab permasalahan yang disampaikan dalam pendahuluan. Bisa dibandingkan juga dengan hasil penelitian lain yang dimuat dalam tinjauan literature.

**ix. Simpulan.** Memuat garis besar penelitian dan jawaban dari penelitian ini terhadap masalah yang dikemukakan dalam pendahuluan.

**x. Daftar Pustaka.** Ditulis alfabetis dengan gaya selingkung APA edisi ke-6

**b. Naskah Hasil Penelaahan.**

Pada umumnya sama dengan naskah hasil penelitian, hanya tanpa **hasil penelitian. Sementara bagian** pembahasan disampaikan dalam bentuk sub-sub judul yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- i. Judul
- ii. Nama Penulis
- iii. Abstrak
- iv. Kata Kunci
- v. Pendahuluan
- vi. Sub-judul Pembahasan
- vii. Sub-Judul Pembahasan
- viii. Simpulan
- ix. Daftar Pustaka

3. Naskah dikirimkan dalam bentuk softcopy berupa attachment dalam email ke : [drdbanten2016@gmail.com](mailto:drdbanten2016@gmail.com) dicec ke [doelha@gmail.com](mailto:doelha@gmail.com), ditujukan kepada Dewan Redaksi Scientium dengan subject

email: Naskah Scientium (Judul Naskah).

4. Teknik pengutipan dan Daftar Pustaka .

Pengutipan dan Daftar Pustaka menggunakan gaya APA edisi ke-6. Daftar pustaka ditulis alfabetis, contoh:

Hague, R. and Harrop, M. (2010). *Comparative Government and Politics (8<sup>th</sup> Edition)*. London: Palgrave Macmillan.

Hayim, M. (2016, 23 April). Dua Sejoli Ditemukan Tewas di Semak-semak. *Indopopnews*, h.20.

Indopopnews. (2016, 20 April). *Menyongsong Hari Kartini*, h.19

Linz, J.L.(2001). Demokrasi, Multinasionalisme, dan Federalisme, dalam I.N.Bhakti dan R. Sihbudi.(Eds.) *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain* (hh. 51-100). Bandung: Mizan.

Prianto, B. (2010). Relasi Organisasi Non Pemerintah – Partai Politik dalam Penguatan Partisipasi Publik di Kota Malang. *JIANA*, 10 (1), 46-68.

Sinpeng, A. (2013). *Non-Democratic Civil Society and The Yellow Shirt in Thailand*. Paper dipresentasikan dalam The 3<sup>rd</sup> KASEAS-CSEAS Joint International Symposium: Border-Crossing and Connectivity in Southeast Asia, (hh. 51-75). Mokpo: KASEAS.

Catatan penting: harus terdapat kesesuaian antara pengutipan dengan daftar pustaka. Lihat tabel berikut:

No	Sumber Kutipan	Pengutipan	Daftar Pustaka
1	Buku	...(Hague and Harrop, 2010) atau ...menurut Hague and Harrop (2010)	Hague, R. and Harrop, M. (2010). <i>Comparative Government and Politics (8<sup>th</sup> Edition)</i> . London: Palgrave Macmillan.
2	Chapter dalam Buku	...(Linz, 2001) Atau	Linz, J.L.(2001). Demokrasi, Multinasionalisme, dan Federalisme, dalam I.N.Bhakti dan R.

		..menurut Linz (2001)	Sihbudi.(Eds.) <i>Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain</i> (hh. 51-100). Bandung: Mizan.
3	Jurnal	...(Prianto, 2010) atau Menurut Prianto (2010)....	Prianto, B. (2010). Relasi Organisasi Non Pemerintah – Partai Politik dalam Penguatan Partisipasi Publik di Kota Malang. <i>JIANA</i> , 10 (1), 46-68.
4	Prosiding	...(Sinpeng, 2013) Atau Berdasarkan penelitian Sinpeng (2013)	Sinpeng, A. (2013). <i>Non-Democratic Civil Society and The Yellow Shirt in Thailand</i> . Paper dipresentasikan dalam The 3 <sup>rd</sup> KASEAS-CSEAS Joint International Symposium: Border-Crossing and Connectivity in Southeast Asia, (hh. 51-75). Mokpo: KASEAS.
5	Majalah/Koran dengan penulis	(Hayim, 2016) atau menurut Hayim (2016)	Hayim, M. (2016, 23 April). Dua Sejoli Ditemukan Tewas di Semak-semak. <i>Indopopnews</i> , h.20.
6	Majalah/Koran tanpa penulis	(Indopopnews, 2016) Atau ...dalam Indopopnews (2016)...	Indopopnews. (2016, 20 April). <i>Menyongsong Hari Kartini</i> , h.19.
7	Portal Berita Online	Menurut Detik.com (2016)	Detik.com (2016, 10 Mei). <i>Apple Masih Raja Komputer</i> . Diunduh dari: <a href="http://inet.detik.com/read/2016/05/10/150859/3207009/317/apple-masih-raja-komputer">http://inet.detik.com/read/2016/05/10/150859/3207009/317/apple-masih-raja-komputer</a> .
8	Skripsi/Tesis/Diseriasi	Menurut Ambardi (2008)	Ambardi, K. (2008). <i>The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin</i> . (Disertasi Doktor). Diunduh dari: <a href="http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1211901025">http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1211901025</a> .

Selain contoh di atas, dipersilahkan mengacu ke teknik pengutipan APA 6<sup>th</sup> edition.

Pustaka yang digunakan harus minimal terdiri dari 80% hasil penelitian dalam bentuk jurnal atau disertasi/tesis. Pustaka yang digunakan harus minimal terdiri dari 80% pustaka yang terbit dalam 10 tahun terakhir.

5. Penulis harus memperbaiki, mengikuti saran serta memberi klarifikasi atas pertanyaan dari editor ahli, dalam kurun satu minggu setelah pengumuman diterima atau ditolak oleh Redaksi.



Scientium (ISSN: 2355-5236, E-ISSN: 2613-8964) adalah jurnal dalam bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, sosial, dan humaniora yang memuat hasil penelitian dan telaahan tentang Banten dan atau dilakukan di wilayah Provinsi Banten. Dalam setiap penerbitan Scientium memprioritaskan naskah hasil penelitian, sebanyak minimal 60% dari jumlah keseluruhan artikel yang dimuat. Scientium bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian tentang Banten yang dilakukan oleh para peneliti dan akademisi di Provinsi Banten.

Scientium diterbitkan sebagai pelaksanaan tugas diseminasi hasil-hasil penelitian yang merupakan salah satu tugas Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :  
Kantor Dewan Riset Daerah Provinsi Banten  
Gedung Bappeda Provinsi Banten Lt.2 Kawasan  
KP3B  
Serang-Banten,  
E Mail: drdbanten2016@gmail.com.  
<http://www.drdbanten.org/jurnal/index.php/jurnal>

ISSN:2355-5236  
E ISSN: 2613-8964